

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DI DESA KANDANGSAPI UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN**

SKRIPSI



Oleh:

Ainia Nuril Qomariyah

NIM 401190217

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2023

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI
DESA KANDANGSAPI UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Strata Satu (S-1)



Oleh:

Ainia Nuril Qomariyah

NIM 401190217

Pembimbing:

Ajeng Pipit Fitriani, S.E., M.S.A.

NIP.199006102020122018

JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ainia Nuril Qomariyah

NIM : 401190217

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA
KANDANGSAPI UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT MISKIN

Secara keseluruhan hasil penelitian ini adalah karya saya sendiri, kecuali
pada bagian tertentu yang harus dilakukan rujukan pada sumbernya.

Ponorogo, 02 Mei 2023

Pembuat pernyataan



Ainia Nuril Qomariyah

NIM 401190217



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Terakreditasi "B" sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat : Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo Telp. (0352) 3576565, Kode Pos 63492
Email: febi@iainponorogo.ac.id Website: <http://https://febi.iainponorogo.ac.id>

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1	Ainia Nuril Qomariyah	401190217	Ekonomi Syariah	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kandang sapi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 02 April 2023

Mengetahui:

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah,



Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I.
NIP. 197801122006041002

Menyetujui:

Pembimbing,

Ajeng Pipit Fitriani, S.E., M.S.A.
NIP 199006102020122018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kandang sapi
Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin
Nama : Ainia Nuril Qomariyah
NIM : 401190217
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang :
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP 197207142000031005

(.....)

Penguji I :
Faruq Ahmad Futaqi, S.E., M.E.
NIP 198311262019031006

(.....)

Penguji II :
Ajeng Pipit Fitriani, S.E., M.S.A.
NIP 199006102020122018

(.....)

Ponorogo, 22 Mei 2023

Mengesahkan,
Dekan FEB IAIN Ponorogo



Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ainia Nuril Qomariyah

NIM : 401190217

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

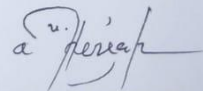
Judul Skripsi / Tesis : Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa
Kandangapi Untuk meningkatkan Kesejahteraan
masyarakat Miskin

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Pembuat Pernyataan,



Ainia nuril Qomariyah

NIM 401190217

ABSTRAK

Qomariyah, Ainia Nuril. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kandang sapi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *Skripsi*. 2023. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Ajeng Pipit Fitriani, M.S.A.

Kata Kunci: Implementasi, PKH dan Kesejahteraan Masyarakat

Program PKH merupakan program perlindungan dan bantuan sosial yang termasuk kedalam klaster 1 yaitu bertumpu pada penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia yang merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan Kesehatan dan Pendidikan. Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan dari pemerintah dirasakan juga oleh keluarga miskin di desa Kandang sapi. Akan tetapi fenomena yang terjadi setelah program tersebut berjalan, masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH lalai akan kegunaan dana yang diberikan pemerintah tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kandang sapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwasanya implementasi PKH di Desa Kandang sapi dirasa sudah cukup berhasil dalam mensejahterakan masyarakat miskin melalui berbagai tahap-tahapannya. Sedangkan implementasi program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kandang sapi dengan pendekatan prinsip-prinsip ekonomi Islam, bahwasannya implementasi PKH di Desa Kandang sapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dikatakan belum tercapai dari segi keadilan dan pertanggungjawaban, tetapi dari penerapan prinsip *takaful* dianggap sudah tercapai.



MOTTO

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.¹

(Q.S. Ar-Ra'd Ayat 11)



¹ Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an* (Bandung: CV Diponegoro, 2000)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan petunjuk dalam mengerjakan skripsi ini. Saya persembahkan:

1. Diri saya sendiri, yang sudah kuat berjuang sejauh ini untuk menyelesaikan kewajiban ini sampai di tahap dimana bisa meraih apa yang diperjuangkan.
2. Alm. Bapakku, dan untuk ibuku tercinta Alhamdulillah anakmu ini bisa menyelesaikan skripsi ini terimakasih selalu mendoakan ku, membimbingku, mendidikku, serta selalu memberikan semangat dan nasehat untuk tetap berjuang menuntut ilmu sampai setinggi mungkin dan selalu mendampingi dalam keadaan apapun.
3. Untuk semua keluargaku yang sudah mendoakan dan memberikan dukungan semangat serta motivasi.
4. Untuk teman-teman seperjuangan yang telah sudi menjadi tempat canda, yang selalu memberikan motivasi serta dukungannya. Terimakasih atas warna kehidupan yang telah diberikan.

Akhirnya, karya tulis ini saya persembahkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dengan sekuat tenaga dan pikiran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Penulisan karya ilmiah skripsi merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana seperti yang telah tercantum dalam kurikulum program studi S₁. Berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, mahasiswa mempunyai kewajiban untuk menulis karya ilmiah skripsi di akhir program studi, sebagai syarat dan pertanggungjawaban ilmiah karena telah menyelesaikan program pendidikan dalam jenjang tertentu, sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan

Dengan mengucap rasa Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt. Yang telah dilimpahkan karunia, rahmat dan hidayah-Nya serta yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, kekuatan, kesabaran dan ilmu pengetahuan. Sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kandangsapi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin” dimana skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana ekonomi (S.E).

Tidak lupa Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan ajaran agamanya yaitu agama Islam yang mampu menciptakan peradapan manusia penuh dengan kedamaian dan nilai-nilai kemanusiaan, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok di *Yaumul Al-Qiyamah Aaamiin.*

Selanjutnya dengan memanfaatkan kemudahan yang secara optimal, kesulitan serta keterbatasan yang menghambat proses penyusunan skripsi ini dapat

diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehubungan dengan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M. Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
2. Dr. H. Luthfi Hadi Aminudin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
3. Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I, selaku Kepala Jurusan Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
4. Ajeng Pipit Fitriani, M.S.A., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk bisa membimbing, mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Abah dan Ibu nyai Pondok Pesantren Al-Barokah serta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Barokah.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. *Aamiin.*

Ponorogo, 25 Januari 2023

Penulis

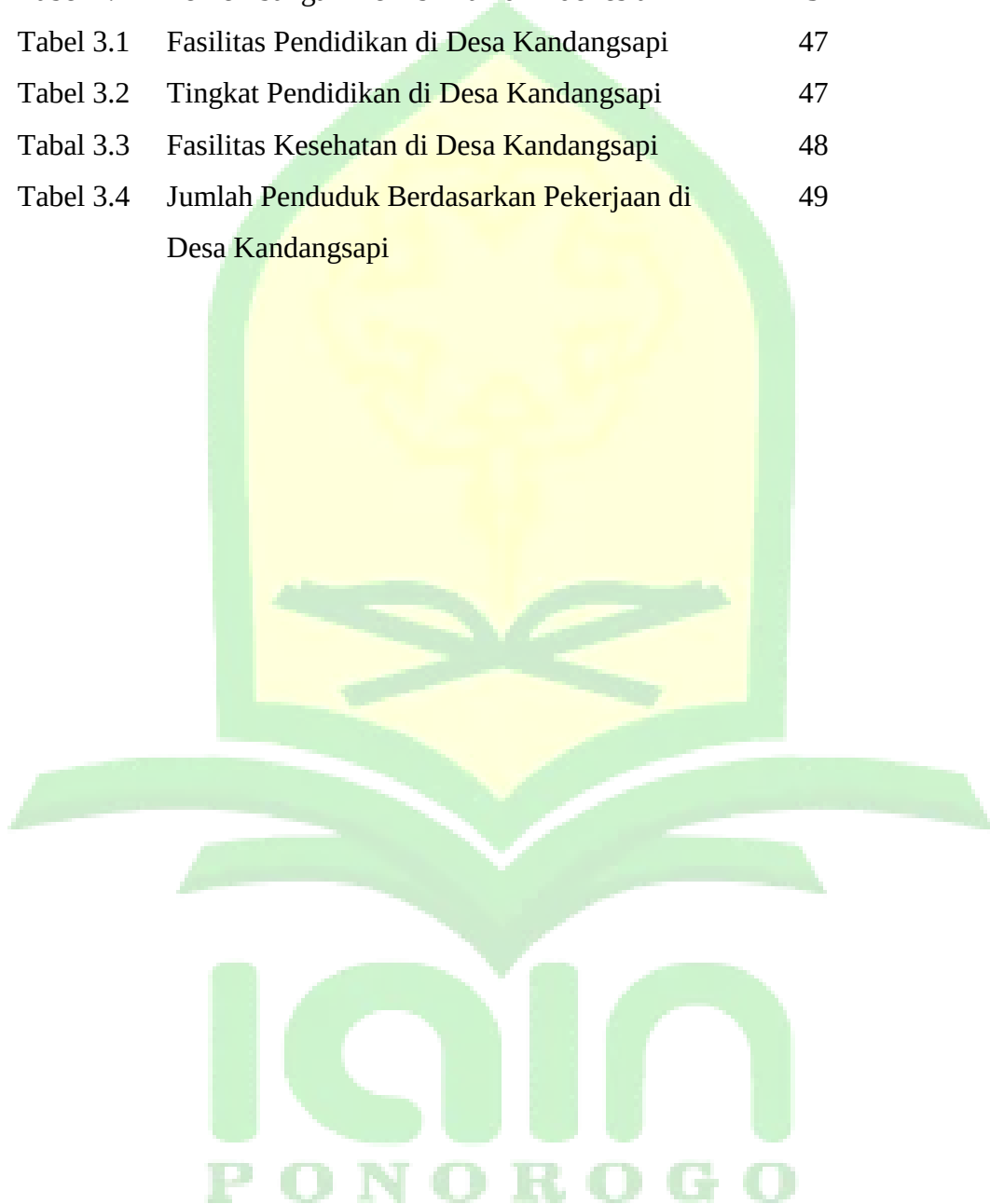
DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Peneliti	8
E. Studi Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II. (TEORI IMPLEMENTASI DAN KESEJAHTERAAN)	24
A. Konsep Implementasi Program	24
B. Program Keluarga Harapan	27
C. Konsep Kesejahteraan Masyarakat.....	33
D. Kesejahteraan Dalam Islam.....	38
E. Kemiskinan	42
BAB III. PAPARAN DATA	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45

B. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kandang sapi	50
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kandang sapi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Mkskin.....	65
D. Dampak Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kandang sapi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin	70
BAB IV. (IMPLEMENTASI PKH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN).....	73
A. Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan di Kandang sapi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin	73
B. Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di Kandang sapi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin	85
C. Analisis Dampak Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Kandangspi	88
BAB V. PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	93
RIWAYAT HIDUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Perkembangan Kemiskinan di Indonesia	3
Tabel 3.1	Fasilitas Pendidikan di Desa Kandang sapi	47
Tabel 3.2	Tingkat Pendidikan di Desa Kandang sapi	47
Tabal 3.3	Fasilitas Kesehatan di Desa Kandang sapi	48
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Desa Kandang sapi	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara terbesar dengan Jumlah penduduk terbanyak keempat yang ada didunia. Dengan jumlah penduduk yang banyak tersebut Indonesia terus berupaya membenahi diri dalam melakukan pembangunan dari berbagai sektor, dengan tujuan merubah setiap aspek menuju kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang. Salah satu tujuan pembangunan yang dilakukan pemerintah yaitu mengenai permasalahan dalam mensejahterakan masyarakat miskin.

Prespektif yang dipakai sangat bermacam-macam mulai dari prespektif sosiologi, ekonomi, hingga moralitas. Konsep kemiskinan secara umum mengartikan bahwa kemiskinan yaitu keadaan seseorang dimana mereka tidak mempunyai kecukupan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman ditinjau dari segi sosial, ekonomi, dimensi spiritual, maupun segi Psikologis.¹ Kemiskinan menurut Bappenas merupakan keadaan seseorang ataupun sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya. Hak-hak dasar ini meliputi terpenuhinya kebutuhan papan, sandang, pangan, Kesehatan, pekerjaan, Pendidikan, air bersih, pertahanan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam, rasa aman

¹ Aain Mahaeni, et. al, "Evaluasi Program-program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali", Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", Vol. X No. 1:8-18, (4 Juli 2014)

dari perlakuan ancaman tindak kekerasan dan hak berpartisipasi didalam kehidupan sosial politik.²

Islam mendefinisikan kemiskinan tidak hanya suatu ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar namun kemiskinan adalah salah satu masalah kultural dimana mereka menjadi miskin akibat perilakunya yang buruk seperti malas berusaha dan bekerja.³ Kemiskinan ini berbahaya untuk akhlak, keluarga, kelogisan berfikir juga masyarakat. Islam menyebut kemiskinan adalah sebagai musibah yang membuat kita harus memohon perlindungan kepada Allah SWT dari kejahatan yang ada didalamnya. Jika kemiskinan ini makin merajalela pasti akan menjadi kemiskinan yang nantinya akan membuat kita lupa kepada Allah dan rasa sosial kita terhadap sesama.

Agama islam jelas mengajarkan kepada setiap individu akan kewajiban untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dengan cara bekerja. Selain adanya kewajiban untuk individu ada juga kewajiban bagi orang lain, keluarga, masyarakat, dan kewajiban pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Kewajiban dari orang lain seperti jaminan sosial, jaminan terhadap keluarga dan jaminan yang berbentuk zakat dan sedekah. Sedangkan kewajiban dari pemerintah tercermin pada kewajibannya mencukupi kebutuhan setiap warganya dari sumber dana yang sah.

² Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kemiskinan 2004.

³Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah, Edisi Revisi* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), 70.

Jika dilihat dari data BPS perkembangan kemiskinan yang ada di Indonesia mengalami penurunan seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Kemiskinan Di Indonesia
Maret 2019 – Maret 2022

Tahun	Bulan	Jumlah Penduduk Miskin
2019	Maret	25,14 juta
	September	24,79 juta
2020	Maret	26,42 juta
	September	27,55 juta
2021	Maret	25,46 juta
	September	26,50 juta
2022	Maret	26,16 juta

Sumber data: Badan Pusat Statistik 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami naik dan turun dari tahun ke tahun. Dapat dilihat bahwasanya jumlah penduduk miskin terakhir yakni pada Maret 2022 tercatat baik karena mengalami penurunan kembali sebanyak 0,34 jiwa dari September 2021. Penurunan tingkat kemiskinan yang telah terjadi tidak luput dari upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, terutama bagi kaum miskin, salah satunya melalui kebijakan memberikan perlindungan sosial bagi penduduk miskin.

Kewajiban pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat miskin tertera pada undang-undang 1945 pasal 34 ayat 1 dan yang menerangkan mengenai jaminan sosial kepada masyarakat. Sedangkan pasal 34 ayat 3

menerangkan bahwasanya pemerintah wajib menyediakan fasilitas pelayanan umum dan fasilitas Kesehatan.⁴ Dari pasal-pasal diatas menjelaskan akan hak-hak bagi setiap warga negara dan bagaimana kewajiban negara terhadap masyarakatnya. Usaha pemerintah dalam menurunkan tingginya jumlah kemiskinan yaitu meningkatkan evektifitas pengentasan kemiskinan melalui diberlakukannya berbagai program berbasis perlindungan sosial seperti JAMKESMAS, BSM, RASKIN, dan PKH. Kemudian program yang berbasis pemberdayaan usaha mikro (KUR), pemberdayaan masyarakat (PNPM). Program diatas berlandaskan pada pasal 1 ayat (9) undang-undang No.11 Tahun 2009 mengenai kesejahteraan sosial.⁵ Dari banyaknya program-program bantuan sosial yang ada, maka penulis tertarik untuk membahas salah satu program kebijakan bantuan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), dikarenakan meskipun program tersebut sudah dijalankan sesuai dengan proses dan mekanisme alur kerja dari PKH, namun dalam pelaksanaannya didapati program ini tidak terlepas dari masalah/hal yang tidak sesuai dengan program ini. seperti contoh dalam proses Pencairan dana yang sering kurang tepat waktu.

Di tahun 2007 pemerintah Indonesia menerapkan suatu bantuan tunai bersyarat atau yang kerap disebut dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Maksud dari dilaksanakannya PKH sebagai upaya dalam memberikan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dalam rangka

⁴ UUD 1945 pasal 34 ayat (1), (2) dan (3)

⁵ UUD 1945 pasal 1 ayat (9)

meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga miskin juga sebagai upaya untuk memutus rantai kemiskinan yang telah terjadi. Program ini termasuk program perlindungan dan bantuan sosial yang termasuk kedalam klaster 1 yaitu bertumpu pada penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia yang merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan Kesehatan dan Pendidikan.⁶

Tujuan diadakannya PKH yaitu agar memutus rantai kemiskinan yang terjadi, meningkatkan kualitas SDM dan mengubah sifat rumah tangga miskin yang dirasa kurang mendukung peningkatan kesejahteraan kelompok lain. Secara khusus tujuan dari PKH ini untuk meningkatkan taraf Pendidikan peserta PKH, meningkatkan pelayanan dan akses Kesehatan dan Pendidikan dan meningkatkan status Kesehatan gizi ibu hamil/nifas dan balita, anak pra sekolah dari peserta PKH.⁷ Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat miskin dirasakan juga oleh keluarga miskin di desa Kandang sapi Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Mata pencaharian mayoritas masyarakat desa Kandang sapi adalah sebagai petani yang masih tergolong dalam petani miskin karena hanya menggarap lahan orang lain.

Desa Kandang sapi memiliki Luas wilayah kurang lebih sekitar 941,54 km² dengan jumlah penduduk kurang lebih 6.432 jiwa, yang masih tergolong kedalam masyarakat ekonomi menengah kebawah. Hal ini

⁶ Dirjen Linjamsos, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Edisi Tahun 2021* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2021), 22.

⁷Ibid.

dibuktikan dengan keadaan tempat tinggal yang masih sederhana dan Pendidikan dari mereka dan anak-anaknya yang kebanyakan hanya sampai SMP dan SMA.⁸ Melihat hal tersebut warga yang miskin di Desa Kandangapi di data oleh masing-masing ketua Rukun Tetangga sebagai bakal penerima bantuan PKH yang akan dijalankan oleh pemerintah, sehingga warga yang masuk kriteria dari keluarga miskin berhak menerima bantuan PKH. Akan tetapi fenomena yang terjadi setelah program tersebut berjalan, masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH lalai akan kegunaan dana yang diberikan pemerintah tersebut. Mereka menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang tidak semestinya, seperti menggunakan dana PKH untuk jalan-jalan dan shopping dan mereka beranggapan pemerintah memberi dana tersebut secara cuma-cuma. Padahal tujuan dana tersebut diturunkan agar membantu keluarga miskin dari kesusahan mencukupi kebutuhan pangan mereka dan juga untuk membantu pendidikan anak namun hal ini disalah gunakan oleh beberapa oknum.⁹

Melihat fenomena yang sedang terjadi di masyarakat tersebut dari pihak kepala desa, pendamping PKH, Pak RT dan juga warga yang menerima bantuan PKH dikumpulkan di kantor desa Kandangapi guna penyuluhan terkait penggunaan dana PKH agar sesuai dari tujuan adanya PKH. Setelah adanya penyuluhan, pendamping PKH lalu mengarahkan warga yang menerima bantuan PKH agar dana yang diterima untuk

⁸ Pandu, *Wawancara*, 10 September 2022

⁹ Tri, *Wawancara* 20 September 2022

keperluan yang sudah ditetapkan seperti kebutuhan Pendidikan, Kesehatan dan lainnya. Hal tersebut dilakukan supaya warga dapat memaksimalkan bantuan PKH dari pemerintah tersebut sehingga bermanfaat dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.¹⁰ Berhubung program tersebut adalah bentuk kesungguhan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya, terutama masyarakat miskin.

Berdasarkan latar belakang yang terjadi diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang implementasi dari program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Maka peneliti mengambil judul penelitian “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kandangapi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kandangapi Kec. Jenar Kab. Sragen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Kandangapi Kec. Jenar Kab. Sragen?
3. Bagaimana dampak implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Kandangapi Kec. Jenar Kab. Sragen?

¹⁰Pandu, Wawancara, 10 September 2022

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Kandang sapi Kec. Jenar Kab. Sragen?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Kandang sapi Kec. Jenar Kab. Sragen?
3. Untuk Mengetahui dan menganalisis dampak implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Kandang sapi Kec. Jenar Kab. Sragen?

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bisa dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan, terutama bagi Ilmu Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan juga menjadi bahan literatur terkait pentingnya program pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti program PKH ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi IAIN Ponorogo

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan tambahan referensi dan informasi bagi civitas akademika IAIN Ponorogo, khususnya bagi mahasiswa Ekonomi Syariah yang erat kaitannya dengan masalah ekonomi.

b. Bagi instansi atau Lembaga terkait PKH

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan referensi bagi Instansi Lembaga terkait yang berhubungan dengan PKH, terutama dalam implementasi program sehingga tujuan program bisa tercapai.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kandang sapi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. Penelitian ini tidak lepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi serta acuan dalam penyusunannya. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Study pada Peserta PKH Kampung Bonglai Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”. Hasil dari penelitiannya mengatakan bahwa efektivitas PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Kampung Bonglai kurang terlaksana secara efektif, karena masih ditemukan kurang

tepat sasaran dalam penentuan peserta PKH dan kurang efektif karena pengalokasian dana PKH oleh penerima menjadikan PKH tidak tepat guna dan tidak sesuai dengan tujuan PKH sehingga PKH belum bisa mengentaskan kemiskinan yang ada dikampung Bonglai.¹¹

Penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)”. Hasil dari penelitiannya mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan di Desa Soko dari tahun 2013-2017 sudah terlaksana dengan baik. Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Soko juga sudah memenuhi indikator tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna dan tepat waktu yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Soko.¹²

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Besuki Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)”. Hasil dari penelitiannya mengatakan bahwasanya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Besuki sudah berjalan dengan efektif, dilihat dari

¹¹ Kartiawati, “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Study pada Peserta PKH Kampung Bonglai Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan,” *Skripsi* (Lampung:IAIN Raden Intan, 2017), 107.

¹² Eny Kusumawati, “Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan PKH Untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2019), 116.

ketercapaian indikator efektivitas program.¹³ Penelitian terdahulu ini beda dengan apa yang saya teliti. Dalam hal ini saya akan meneliti mengenai Implementasi PKH guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Penelitian yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Lilirawang Kecamatan Bengo kabupaten Bone (Studi Kasus: PKH di Bidang Pendidikan”. Hasil dari penelitiannya mengatakan bahwasanya Implementasi PKH di Desa Lilirawang kurang berjalan dengan baik, karena dari keempat indikator keberhasilan implementasi kebijakan yang digunakan peneliti hanya satu faktor yang berjalan.¹⁴

Penelitian yang Berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi”. Hasil dari penelitiannya mengatakan bahwasanya tahapan Implementasi program PKH di Kecamatan Kabat ada 5 tahapan: *Pertama*, tahap persiapan, *kedua*, tahap pengumpulan data dan informasi, *ketiga*, tahap pelaksanaan, *keempat*, tahap evaluasi, *kelima*, tahap terminasi.¹⁵

Penelitian yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

¹³ Suyanti, “Efektivitas Progam Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Besuki Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas),” *Skripsi* (Purwokerto:UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2022), 81.

¹⁴ Arlina, Muhammad Guntur, Umar Nain, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Lilirawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone (Studi Kasus: PKH Bidang Pendidikan)” *Jurnal Ilmu Sosiologi Dialektika Kontemporer*, Vol. 9, No. 2, (2021), 78.

¹⁵ Khoirul Abdul Manan, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi”, *Skripsi* (Jember: IAIN Jember, 2019), 92.

(Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban). Hasil dari penelitiannya mengatakan bahwasannya PKH mensyaratkan pesertanya untuk memanfaatkan pelayanan Kesehatan agar dapat meningkatkan taraf Kesehatan secara optimal. Dalam kondisi sehat maka anak akan siap memasuki pendidikan, dan dengan Pendidikan terjadi perubahan kearah perbaikan SDM untuk jangka yang panjang sehingga akan memutus rantai kemiskinan. berdasarkan data yang ada diketahuui bahwa setiap tahunnya jumlah peserta PKH di Desa Beji mengalami penurunan. Hal ini membuktikan bahwa bantuan PKH setidaknya akan mengurangi angka kemiskinan.¹⁶

Penelitian yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Puncakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Hasil dari penelitiannya mengatakan bahwasannya pelaksanaan PKH di Desa Puncakarya kurang terlaksana dengan baik. Dibuktikan mengenai pengetahuan dan sosialisasi program PKH yang dilakukan oleh pendamping hanya dilakukan antara penerima dan petugasnya saja. Sementara sosialisasi yang dilakukan kepada tokoh masyarakat dan masyarakat luas tidak dilakukan dengan baik. Sehingga stakeholders pendukung PKH belum mendukung sepenuhnya.¹⁷

¹⁶ Dyah Ayu Virgoreta, Ratih Nur P., Suwondo, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 12, (2015), 4.

¹⁷ Kartika Ayu, Sutomo, Kholiq Azhari, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Puncakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember”, *Jurnal Ekonomi Ekuilibrium*, Vol. 4, No. 1, (2020), 15.

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)”. Hasil penelitiannya mengatakan bahwasannya target pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Purwoasri yaitu terbantunya masyarakat tidak mampu khususnya RTSM dalam memenuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan pendidikan anaknya dan kesehatan ibu hamil dan balita. Hasil Evaluasi membuktikan bahwa penerima PKH mau melakukan dan memenuhi komitmennya dikarenakan takut dengan adanya sanksi yang diberikan. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa setiap tahun nya peserta PKH mengalami penurunan.¹⁸

Penelitian yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak”. Hasil penelitiannya mengatakan bahwasannya Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, baik pada aspek kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial telah berjalan dengan baik. Karena setiap bulannya selalu diadakan pertemuan untuk upaya membimbing peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun setiap pertemuan tidak dihadiri oleh seluruh peserta, namun dapat bergantian pada pertemuan berikutnya. Adanya bantuan PKH telah berdampak baik kepada masyarakat Desa Kota Rantang.¹⁹

¹⁸ Dedy Utomo, Abdul Hakim, Heru Ribawanto, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 1, 34.

¹⁹ Siswati Saragi, Maria Ulfa, Nur Ambia Arma, “Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak”, *PUBLIK: Jurnal*

Penelitian yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Salah Satu Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang)”. Hasil penelitiannya mengatakan bahwasannya Pelaksanaan PKH di Kelurahan Tanjungrejo dinilai belum efektif dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan di daerah tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan belum berkurangnya jumlah penduduk miskin yang menjadi peserta PKH. Sementara dari sikap mental pesertanya belumlah menunjukkan adanya suatu perubahan.²⁰

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Suku Dinas Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Lagoa Jakarta Utara”. Hasil penelitiannya mengatakan bahwasannya dengan adanya bantuan PKH ini meskipun masih ada faktor penghambatnya namun berdampak positif dalam pelaksanaannya, dikarenakan program PKH sepenuhnya memberikan kemudahan dan dibimbing langsung oleh pendamping masing-masing wilayah.²¹

Penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau)”.

Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, Vol. VIII, No. 1, (2021), 9.

²⁰ Lingga Tawakal, Supartono, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Salah Satu Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 3 No. 2, 18.

²¹ Siti Rohmah, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Suku Dinas Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Lagoa Jakarta Utara,” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 89.

Hasil penelitiannya mengatakan bahwasannya eektivitas PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Jawa masuk dalam kategori tidak Baik. Dibuktikan dengan ketidakevektivitan program yang terlaksana seperti kurang intesifnya pertemuan yang dilakukan antara pendamping dengan penerima bantuan, serta adanya ketidak tepatan sasaran penerima bantuan.²²

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Aceh Barat Daya”. Hasil penelitiannya mengatakan bahwasannya eektivitas PKH di sana kurang efektif karena, dana bantuan kurang tepat sasaran, waktu pencairan kurang berjalan dengan baik dan perubahan nyata dari bantuan dana PKH belum efektif sehingga angka kemiskinan di sana tidak dapat diatasi.²³

Penelitian yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Prov. Jambi.” Hasil penelitiannya mengatakan bahwasannya dalam implementasi PKH disana belum dapat dikatakan maksimal karena masih banyak warga miskin yang belum mendapat bantuan dari PKH dan dari data penerima manfaat PKH tersebut

²² Ridho Diana, “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau)”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 104.

²³ Lisa Nurhidayati, “Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Aceh Barat Daya,” *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), 89.

terdapat penerima yang sebenarnya tidak termasuk dalam kategori penduduk miskin.²⁴

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Program keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan”. Hasil penelitiannya mengatakan bahwasannya Pelaksanaan PKH disana masih belum efektif karena ada beberapa data peserta PKH yang dinyatakan mampu namun menjadi peserta PKH dan dalam sosialisasi program juga belum efektif karena peserta PKH dan Aparat Pemerintah Kecamatan tidak sepenuhnya mengerti tentang PKH.²⁵

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dapat diketahui bahwasannya penelitian yang akan dilakukan peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, meskipun memiliki focus kajian yang sama pada tema tertentu, akan tetapi pada penelitian yang akan diteliti lebih menekankan pada Implementasi PKH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

²⁴ Rahmania, “Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Prov. Jambi,” *Skripsi* (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020), 61.

²⁵ Enda Novieta, Sujianto dan Harapan Tua, “Efektivitas Program keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 15, No. 2 (2019), 190.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung yang dilakukan dilapangan atau kepada responden. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah data yang bukan berupa angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumentasi pribadi, catatan memo dan resmi.²⁶

Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi maka peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data. Karena subjek penelitian adalah program yang nantinya akan dituliskan dalam bentuk kata-kata yang tertulis yang menggambarkan fenomena. Data yang diperoleh melalui wawancara. Pada penelitian ini fenomena yang dimaksud adalah Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kandang sapi Kec. Jenar Kab, Sragen.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti di lokasi penelitian sangat penting. Oleh sebab itu kehadiran peneliti tidak boleh diwakilkan oleh siapapun karena kehadiran dari peneliti ini untuk pengumpulan data.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 6.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Kandang sapi Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan peneliti menemui permasalahan terkait ketidaktepatan penggunaan dana PKH oleh peserta, sehingga peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai implementasi PKH di Desa Kandang sapi Kec. Jenar Kab, Sragen.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta, informasi, atau keterangan yang merupakan bahan baku dalam penelitian yang digunakan sebagai bahan pemecahan masalah atau mengungkapkan suatu gejala.²⁷ Data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan narasumber. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari wawancara langsung kepada pihak yang berperan pada PKH di Desa Kandang sapi seperti pendamping dan penerima bantuan. Data yang menggunakan data primer yaitu:

- 1) Implementasi PKH di Desa Kandang sapi
- 2) Faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi

Program Keluarga Harapan (PKH)

²⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: A- Ruzz Media, 2016), 204.

- 3) Dampak positif dan negatif dari implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)

b. Sumber Data

- 1) Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan pendamping PKH dan penerima bantuan di Kandang sapi Kec. Jenar Kab, Sragen terkait implementasi PKH di Desa Kandang sapi Kec. Jenar Kab, Sragen.
- 2) Data Sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur dari berbagai buku, jurnal ataupun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan implementasi PKH.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Kelebihan metode observasi dibandingkan dengan metode survey adalah data yang dikumpulkan pada umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat dan bebas dari *response bias*.²⁸

Peneliti melakukan observasi dengan mengamati aktivitas yang dilakukan dan berkomunikasi dengan informan dengan melakukan observasi secara langsung terhadap objek penelitian dengan mengamati apa yang dikerjakan, mendengarkan apa yang

²⁸ Etta Mamang, *Metodologi Penelitian*, 171.

diucapkan. Dalam hal ini peneliti datang langsung ke lokasi pencairan dana PKH dan terlibat langsung dalam kegiatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik yang dilakukan guna mendapatkan hal-hal yang diteliti lebih mendalam dengan menginterpretasikan situasi dan fenomena yang ada, dimana hal tersebut tidak ditemukan dalam teknik observasi.²⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pendamping PKH yaitu Bu Suryani dan Mbak Tri Wahyuni dan peserta PKH yaitu Bu Rusmini, Bu Sutini, Bu Cicik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data tertulis dari pelaksanaan PKH di Desa Kandang sapi yang mengandung penjelasan mengenai fenomena yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengelolaan data berasal dari data yang diperoleh dari hasil wawancara. Pengelolaan data bertujuan untuk membantu proses penelitian agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, memecahkan masalah dan menjawab persoalan yang sedang dipertanyakan dalam penelitian.³⁰

²⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 64.

³⁰ Muh. Fitrah & Lutfiyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 31.

Sesuai dengan model Miles dan Huberman seperti yang dikutip oleh Arif Mulian menyatakan bahwa aktivitas dalam pengelolaan data dapat dilakukan dengan melalui beberapa langkah, sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu mencoba merangkum data dari hal-hal yang pokok dan penting serta terkait dengan topik penelitian.
- b. Penyajian data, yaitu data yang disajikan dalam bentuk tabel dan gambar, sehingga data tersebut dapat tersusun dalam pola hubungan atau saling keterkaitan.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang harus didukung dengan data yang valid dan konsisten sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.³¹

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pada penelitian ini dilakukan teknik pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik pemeriksaan triangulasi yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, teori.³²

8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan cara

³¹ Ibid, 32.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 330.

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang tidak penting, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³³ Setelah data terkumpul baik dari penelitian maupun studi Pustaka, maka data akan dianalisis menggunakan model analisis kualitatif yaitu penulis menggambarkan data yang terkumpul dengan menyusun kata-kata atau kalimat untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Tahapan analisis kualitatif adalah setelah data terkumpul, lalu dianalisis dan kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang digunakan sehingga dapat terevaluasi. Setelah data terevaluasi maka akan didapatkan kesimpulan baru yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan serta pemahaman dalam penelitian ini maka terdapat lima bab yang saling berkaitan dan membentuk pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI

³³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2013).
244.

Pada bab ini berisikan kajian teori yang merupakan penjabaran dari judul yang diangkat berdasarkan teori-teori yang digunakan dan studi penelitian terdahulu yang dijadikan bahan acuan dalam pembahasan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan penelitian, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini fokus dalam pembahasan terkait implementasi PKH di Desa Kandangapi Kec. Jenar Kab, Sragen.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan penelitian serta dilengkapi saran yang dapat dijadikan bahan perbaikan dari peneliti.

BAB II

TEORI IMPLEMENTASI DAN KESEJAHTERAAN

A. Konsep Implementasi Program

1. Pengertian Implementasi Program

Implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan dalam melakukan kegiatan sehingga pelaksana kebijakan bisa mengetahui apakah kebijakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan tersebut diaplikasikan dengan berbagai bentuk program yang di bangun oleh pembuat kebijakan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi yang efektif adalah sebuah kondisi yang dapat dibangun dari pengetahuan dan pengalaman dari orang-orang yang ada di garis depan pemberi layanan.¹

Pressman dan Wildavsky dalam Parsons menyatakan Kebijakan adalah hipotesis yang berisi kondisi awal dan perkiraan konsekuensinya. Oleh karena itu, implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut yang pada dasarnya adalah kemampuan untuk membangun hubungan dalam mata rantai sebab akibat agar kebijakan bisa berdampak. Menurut mereka Implementasi akan semakin tidak efektif jika hubungan antara semua agen yang menjalankan kebijakan justru menghasilkan defisit implementasi. Tujuan harus didefinisikan secara

¹ Wayan Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: Kencana, 2011), 472.

jas dan dipahami dengan baik, sumber daya harus disediakan, rantai komando harus bisa menyatukan dan mengontrol sumber-sumber daya tersebut, dan sistem harus bisa berkomunikasi secara efektif dan mengontrol individu dan organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas.² Sedangkan Program adalah rencana yang telah diolah dengan memperhatikan faktor faktor kemampuan ruang waktu dan urutan penyelenggaraannya secara tegas dan teratur sehingga menjawab tentang siapa, dimana, sejauh mana dan bagaimana.³

Menurut Soenarko, ada 3 kategori dalam pengimplementasian suatu program atau kebijakan, yakni:⁴

- a. *Interpretation* (interpretasi) adalah menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- b. *Organization* (organisasi) adalah pembentukan atau penataan Kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.
- c. *Aplication* (penerapan) adalah segala keputusan dan peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terealisirnya tujuan kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah menjalankan atau melaksanakan

² Ibid., 466.

³ Soenarko, *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebujaksanaan Pemerintah* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2000), 139.

⁴ Ibid., 187.

suatu rencana yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan dalam bentuk program dengan maksud tercapainya tujuan-tujuan tertentu.

2. Tahapan - tahapan Implementasi Program

Tahapan dalam implementasi program menurut Rendall B. Ripley dalam Soenarko adalah sebagai berikut:⁵

- a. Persiapan, sebelum dilaksanakan program pelaksanaan kebijakan terlebih dahulu harus melakukan persiapan untuk pengkajian program serta mempersiapkan apa yang dibutuhkan dan diperlukan ketika program akan dilaksanakan dengan menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas.
- b. Pengumpulan data dan informasi, pengumpulan data dilakukan dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi dari pihak yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas, dimana menggambarkan secara umum yang terkait dengan subjek pembahasan.
- c. Pelaksanaan, masing-masing pihak yang terkait melaksanakan kegiatan program dalam rangka mencapai keberhasilan program dengan mengikuti segala ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam program tersebut.
- d. Evaluasi, dengan evaluasi maka suatu program atau kebijakan akan dapat diketahui kelemahan atau kekurangannya sejak direncanakan

⁵ Ibid., 250.

sampai pelaksanaannya untuk mencapai tujuannya memenuhi kebutuhan masyarakat.

- e. Terminasi, merupakan akhir dari suatu relasi perubahan. Berakhirnya suatu relasi perubahan dapat terjadi karena waktu bertugas sudah berakhir atau masyarakat sudah untuk mandiri.

B. Program Keluarga Harapan

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial PKH sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial PKH berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.⁶

Program Keluarga Harapan atau disebut juga PKH adalah program bantuan sosial bersyarat bagi Keluarga Miskin (KM) dan

⁶ Peraturan Menteri Sosial RI NO. 1 Tahun 2018.

rentan miskin yang telah ditetapkan sebagai penerima PKH (Program Keluarga Harapan). Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH dengan tujuan untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan, dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan. Program perlindungan sosial yang juga dikenal sebagai *Conditional Cash Transfer* (CCT) ini di dunia internasional terbukti sangat efektif dalam memerangi kemiskinan di semua negara.

Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH memungkinkan keluarga miskin khususnya ibu hamil dan anak usia dini untuk menggunakan layanan kesehatan dan pendidikan yang tersedia di sekitar tempat tinggal mereka. Manfaat PKH juga didorong untuk mengikutsertakan penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan tetap menjaga tingkat perlindungan sosialnya. Melalui PKH Keluarga Miskin (KM) didorong untuk mengakses dan menggunakan layanan sosial dasar dibidang kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan dukungan, serta program perlindungan sosial tambahan lainnya. PKH dicita-citakan sebagai *episentrum* pengentasan kemiskinan dan *center of excellence* yang mengintegrasikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.⁷

a. Tujuan PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan sebagai berikut:

⁷ Dirjen, *Pedoman Pelaksanaan.*, 7.

- 1) Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan sosial
 - 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
 - 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan Kesehatan dan Pendidikan serta kesejahteraan sosial
 - 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
 - 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.
- b. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH
- 1) Hak KPM PKH
KPM PKH berhak mendapatkan:
 - a) Bantuan sosial PKH
 - b) Pendampingan sosial PKH
 - c) Pelayanan di fasilitas Kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan sosial
 - d) Program bantuan komplementer di bidang Kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.⁸
 - 2) Kewajiban KPM PKH
Kewajiban KPM PKH terdiri dari:

⁸ Ibid., 24.

- a) Komponen Kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui, anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib memeriksakan Kesehatan pada fasilitas/layanan Kesehatan sesuai dengan protokol Kesehatan.
- b) Komponen Pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif.
- c) Komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia dan penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali.
- d) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan.
- e) Seluruh anggota KPM harus memenuhi kewajibannya kecuali jika terjadi keadaan kahar.
- f) KPM yang tidak memnuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi. Mekanisme sanksi ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen.⁹

⁹ Ibid.

c. Kriteria Penerima Manfaat PKH

Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen Kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan sosial, setiap komponen memiliki kriteria sebagai berikut:¹⁰

1) Komponen Kesehatan

Kriteria penerima PKH komponen Kesehatan adalah sebagai berikut:

a) Ibu Hamil/nifas/menyusui

Ibu hamil/nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui.

b) Anak Usia Dini

Anak usia dini adalah anak dengan rentan usia 0-6 tahun yang belum bersekolah.

2) Komponen Pendidikan

Komponen penerima PKH komponen Pendidikan yakni anak usia sekolah dengan rentan usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat Pendidikan SD/MI sederajat atau SMP/MTS Sederajat dan SMA/MA sederajat.

¹⁰ Ibid., 22-23.

3) Komponen Kesejahteraan Sosial

Kriteria penerima PKH komponen kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

a) Lanjut Usia

Seseorang berusia lanjut yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

b) Penyandang Disabilitas Berat

Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari atau sepanjang hidupnya bergantung orang lain dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri yang tercatat dalam KK yang sama dan berada dalam keluarga.

d. Alur Pelaksanaan PKH

Alur kerja penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan oleh Subdit Bantuan Sosial dengan bekerja sama dengan subdit terkait lainnya termasuk Subdit Validasi dan Terminasi memastikan data hasil validasi, pemutakhiran dan verifikasi dari daerah dapat diinput. Subdit Bantuan Sosial mengajukan bantuan sosial sesuai dengan penetapan SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang diproses oleh Subdit Kepesertaan. Subdit Sumber Daya memastikan pendamping melakukan validasi, pemutakhiran dan verifikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.¹¹

¹¹ Ibid., 26.

C. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan masyarakat: “kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”¹²

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta “Catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin. Kesejahteraan ekonomi dalam ilmu ekonomi Modern didefinisikan sebagai bagian kesejahteraan yang dapat dikaitkan dengan alat pengukur uang.¹³ ¹⁴Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poerwadarminto, sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya).¹⁵

¹² Isbandi Rukminto Hadi, *Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2015), 23.

¹³ Siti Nur Mahmudah dan Fath Ervan Zulfa, Badrus Sholeh “Pengaruh Zakat Maal Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahiq di Yatim Mandiri Kediri,” *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 6, No. 1 (2018), 80.

¹⁴ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 8.

¹⁵ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Amzah, 2016), 36.

Menurut istilah “masyarakat” dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris *society* dan *community*. Dalam ilmu komunitas dan pengembangan masyarakat dalam perspektif sosiologi istilah masyarakat diterjemahkan dari kata atau konsep *community* atau komunitas. Komunitas ialah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasi dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama (*communities of common interest*), baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial. Istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai “masyarakat setempat”. Istilah komunitas dalam batas-batas tertentu dapat menunjuk pada warga sebuah dusun (dukuh atau kampung), desa, kota, suku, atau bangsa. Apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tersebut dinamakan sebagai komunitas.¹⁶ Pengertian masyarakat menurut Soetomo adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi. Sedangkan menurut Edi Soeharto, masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling

¹⁶ Fredian Tonny Nasdian, *Pembangunan Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 1-2.

berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama.¹⁷

Muhammad Abdul Mannan mengutip pendapat Dr. Dalton yang menyatakan bahwa terdapat dua syarat pokok untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. *Pertama*, melalui perbaikan dalam sarana produksi, dan *kedua*, melalui mekanisme perbaikan dalam sistem distribusi. Perbaikan dalam sistem distribusi diwujudkan melalui upaya pengurangan perbedaan dalam pendapatan individu dan keluarga yang berlainan yang biasa tampak pada komunitas yang beradab dan pengurangan fluktuasi antara periode waktu yang berbeda-beda dalam pendapatan individu dan keluarga, terutama masyarakat yang lebih miskin.¹⁸

a. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan kesejahteraan dapat dicapai secara seksama, melalui teknik-teknik dan metode tertentu dengan maksud untuk memungkinkan individu, kelompok, maupun masyarakat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah penyesuaian diri mereka terhadap perubahan pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerja sama untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial.¹⁹ Menurut Friedlander, tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar

¹⁷ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 25.

¹⁸ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga), 14.

¹⁹ Rohiman, *Pengantar Kesejahteraan*, 37.

kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak. Selain itu, juga untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya, peningkatan derajat harga diri setinggi mungkin, kesehatan berpikir, dan melakukan kegiatan tanpa gangguan, sesuai dengan hak asasi seperti yang dimiliki sesamanya.²⁰

Menurut Badan Pusat Statistik indikator yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu sebagai berikut:²¹

1) Kependudukan

Indikator kependudukan dapat dilihat melalui rasio jenis kelamin, dan program yang mendukung fertilitas.

2) Kesehatan dan gizi

Indikator Kesehatan dan gizi dapat dilihat melalui angka harapan hidup, tingkat kematian bayi, angka kematian kasar dan jumlah kematian.

3) Pendidikan

Indikator Pendidikan dapat dilihat melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni dan kasar, dan ketersediaan sarana prasarana pendidikan.

²⁰ Ibid., 40.

²¹ Badan Pusat Statistik, *Indikator kesejahteraan Rakyat 2022* (Jakarta: CV Daffa Putra, 2022), 109.

4) Ketenagakerjaan

Indikator tenaga kerja dapat dilihat melalui kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja, penurunan TPT dan peningkatan rata-rata upah kerja.

5) Pola konsumsi

Indikator pola konsumsi dapat dilihat melalui rata-rata konsumsi energi dan protein.

6) Perumahan dan lingkungan

Indikator perumahan dan lingkungan dapat dilihat melalui status kepemilikan rumah dan kualitas perumahan.

7) Kemiskinan

Indikator kemiskinan dapat dilihat melalui presentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

8) Sosial lainnya

Indikator sosial lainnya dapat dilihat melalui presentase penduduk yang berpergian, presentase rumah tangga menerima bantuan pangan, presentase rumah tangga penerima kredit usaha dan presentase rumah tangga yang mempunyai akses teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Adi Fahrudin, kesejahteraan sosial mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.²²

D. Kesejahteraan dalam Islam

Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan. Di antara istilah-istilah itu yang cakupan maknanya luas dan mendalam serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar adalah istilah "*al-falah*" yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini.²³

Secara kebahasaan perkataan "*al-falah*" berarti keberuntungan, kesuksesan dan kelestarian dalam kenikmatan dan kebaikan. Sementara itu, ar-Raghib al-Ashfani menjelaskan bahwa perkataan *al-falah* dalam kosa kata al-Qur'an mengandung dua makna, duniawi dan ukhrawi. Secara harfiah, perkataan *al-falah* berarti mendapatkan atau memperoleh keberuntungan. *Al-falah* dalam konteks keduniaan ditandai dengan keberhasilan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dengan memperoleh segala hal yang menyebabkan kehidupan ini baik dan menyenangkan dengan

²² Adi, *Pengantar Kesejahteraan*, 10.

²³ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 1.

berkesinambungan, berkecukupan dan bermartabat. Dalam pada itu, *al-falah* dalam konteks kehidupan akhirat dibangun di atas empat penyangga; (a) kebahagiaan kekal abadi tanpa mengalami kebinasaan, (b) berkecukupan tanpa mengalami kefakiran, (c) kemuliaan tanpa mengalami kehinaan, dan (d) pengetahuan tanpa mengalami kebodohan, sehingga bisa dirumuskan tidak ada kehidupan yang sempurna kecuali kehidupan akhirat.²⁴

Di dalam al-Qur'an, masyarakat yang sejahtera dinamakan *al-muflihun*, yang secara harfiah berarti orang-orang yang beruntung. Indikator masyarakat yang sejahtera (*al-muflihun*), yaitu mereka yang beriman kepada gaib, melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada (al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah diturunkan kepadamu (Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, (meraih kesejahteraan dunia dan akhirat).²⁵

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka. Maka sistem ekonomi

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid., 2.

Islam mencoba meredakan konflik ini sehingga terwujud kemanfaatan bersama.²⁶

Dalam prespektif islam, kesejahteraan manusia akan terwujud manakala sendi-sendi kehidupan ditegakkan di atas nilai-nilai dalam ekonomi islam sebagai berikut:²⁷

1. *Keadilan*, keadilan dapat dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran.
2. *Pertanggungjawaban*, pertanggungjawaban merupakan sifat yang sangat penting bagi seluruh umat manusia untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan, juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.
3. *Tafakul* (jaminan sosial), yaitu merupakan wujud atas dasar kepedulian masyarakat atau kebijakan pemerintah dalam hal merealisasikan kepeduliannya terhadap rakyat. Adanya jaminan sosial dimasyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan

²⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 10.

²⁷ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013), 63.

masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

Adapun kesejahteraan perspektif ekonomi Islam berdasarkan klasifikasi sifat adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang

Mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial. Manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan harus seimbang di antara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual, akan tetapi tentu saja tidak terlepas dari lingkungan sosial. Manusia akan bahagia jika terdapat keseimbangan di antara dirinya sendiri dengan lingkungan sosialnya.

2. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat

Manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, akan tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang dalam segala hal lebih bernilai. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material-spiritual pada kehidupan di dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falah*.²⁸

²⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi*, 15.

E. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan berasal dari kata miskin yang berarti tidak berharta benda; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Dalam arti luas kemiskinan tidak saja berkaitan dengan rendahnya tingkat kepemilikan harta benda, tetapi juga berhubungan dengan terbatasnya berbagai potensi di luar kehartabendaan, seperti miskin pengetahuan, miskin kekuasaan, miskin kasih sayang dan sebagainya.²⁹

Menurut Ganjar Kartasasmita kemiskinan dapat dilihat dari dua pengertian, kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi kemiskinan yang terburuk, yang diukur dari tingkat kemampuan keluarga untuk membiayai kebutuhan yang minimal untuk dapat hidup sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kemiskinan relatif adalah perbandingan antara suatu golongan dengan golongan lainnya. Kemiskinan relatif adalah tingkat kemiskinan yang sulit dapat dihilangkan karena ada saja orang yang merasa lebih miskin dari orang lain.³⁰

Menurut Kurniawan (2004) kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak. Definisi

²⁹ Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 7.

³⁰ Ibid., 16.

lainnya yang biasa digunakan menurut *European Union* bahwa kemiskinan sebagai kondisi seseorang dengan sumberdaya (material, sosial dan budaya) yang sangat terbatas (Anonymous tahun depan).³¹ Penduduk miskin kerap dianggap tidak sejahtera. Kesejahteraan diperhatikan dari indeks pembangunan manusia, sedangkan kemiskinan diperhatikan dari tingkat partisipasi Angkatan kerja dan jumlah rata-rata penduduk miskin.³²

a. Kriteria Miskin Menurut BPS

Ada 14 kriteria miskin menurut BPS dalam keluarga harapan yaitu sebagai berikut:

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
- 2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan.
- 3) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.

³¹ Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 12-18.

³² Sholikhah, Dkk, "Peran lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)," *Jurnal Of Islamic Philanthropy and Disaster*, Vol. 1, No. 1 (2021), 31.

- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
- 8) Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas.
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lain dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.
- 13) Pendidikan tertinggi kepalarah tangga : tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD.
- 14) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti sepeda motor (baik kresit atau non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.³³

Apabila rumah tangga/ keluarga yang memiliki minimal 9 kriteria di atas, maka rumah tangga/ keluarga tersebut termasuk rumah tangga/ keluarga miskin.

³³ <https://sendangsari.bantulkab.go.id/first/artikel/724-14-KRITERIA-MASYARAKAT-MSKIN-MENURUT-STANDAR-BPS> diakses pada tanggal 15 Desember 2022

BAB III

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Kandang sapi

Desa Kandang sapi secara historis diawali dari adanya perang Mangkubumen pada dekade 1746-1757. Perang tersebut ada kaitannya dengan sejarah pemerintahan Kabupaten Sragen, yakni perjalanan pangeran Mangkubumi yang berjuang melawan VOC hingga akhirnya menjadi Sultan Hamengku Buwono I di Keraton Yogyakarta. Perang Magkubumen itu terjadi karena kekecewaan pangeran Mangkubumi yang tidak mendapatkan tanah Sukowati setelah berhasil memadamkan pemberontakan Pangeran Sambernyawa. Kemudian Pangeran Mangkubumi keluar dari keraton untuk melawan VOC. Perjalanan Pangeran ini berawal dari Pondok Karangnongko di Krikilan, Masaran, hingga sempat singgah di wilayah Jenar.

Selama berperang melawan VOC ini, Pangeran Mangkubumi terus bergerilya dengan membuat keraton *ing ngalaga* atau keraton di daerah peperangan. Salah satu keraton *ing ngalaga* itu berada di daerah pertemuan antara sungai Sawur dan Bengawan Solo. Di dekat tempuran dua sungai itu ada lahan seluas dua hektare yang dikenal warga sekarang merupakan tanah keraton. Lokasi ini berada di utara Bengawan Solo, tepatnya masuk Dukuh Tawang, Kandang sapi. Di lokasi tersebut masih ditemukan sisa-sisa batu bata kuna dan batu yoni.

Dan di tempat itulah disuga Pangeran Mangkubumi mendirikan keraton *ing ngalaga*.

Di *ing ngalaga* itu pangeran Mangkubumi mendeklarasikan sebagai Susuhunan Kabanaran. Saat itu, Pangeran Mangkubumi dibantu oleh 27 tokoh kuat yang dikenal dengan sebutan brandal Sukowati yang diambil dari kelompok yang melawan Belanda. Kandang sapi itu artinya tempat sapi. Nama sapi sejak dulu dikenal sebagai simbol perjuangan. Jadi Kandang sapi itu artinya kandangnya brandal Sukowati.¹

2. Demografi Desa

Desa Kandang sapi mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.270 yang terdiri dari:²

Penduduk Laki-laki : 2659

Penduduk Perempuan : 2611

Sedangkan jumlah kepala keluarga di Desa Kandang sapi adalah sebagai berikut:

a. KK Laki-laki : 1230

b. KK Wanita : 247

1. Kondisi Infrastruktur

a. Fasilitas Pendidikan

Adanya fasilitas pendidikan merupakan hal yang sangat penting, dengan adanya fasilitas pendidikan diharapkan

¹ Dokumentasi Desa Kandang sapi 2022

² Ibid.

meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah pendidikan untuk masa depan. Berikut fasilitas Pendidikan yang ada di Desa Kandang sapi.

Tabel 3.1

Fasilitas Pendidikan Desa Kandang sapi³

No.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	2
2.	TK/RA	5
3.	SD/MI	4
4.	SMP/MTS	1
5.	SMA/SMK/MA	-

Sumber: Dokumentasi Desa Kandang sapi 2022

Selanjutnya adalah tabel yang menunjukkan tingkat pendidikan di Desa Kandang sapi.

Tabel 3.2

Tingkat Pendidikan Di Desa Kandang sapi⁴

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	253
2.	Tidak Sekolah	328
3.	Tidak Tamat SD	765
4.	Tamat SD	1.524

³ Ibid.

⁴ Ibid.

5.	Tamat SLTP	1.393
6.	Tamat SLTA	945
7.	Akademi/Universitas	62

Sumber: Dokumentasi Desa Kandang sapi 2022

b. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Kesehatan merupakan suatu fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh setiap lapisan masyarakat. Berikut fasilitas Kesehatan yang ada di Desa Kandang sapi:

Tabel 3.3
Fasilitas Kesehatan di Desa Kandang sapi⁵

No.	Jenis	Jumlah
1.	Posyandu	8
2.	Posbindu	1
3.	Pos Lansia	1

Sumber: Dokumentasi Desa Kandang sapi 2022

2. Keadaan Ekonomi

a. Pekerjaan

Mayoritas penduduk Desa Kandang sapi bekerja sebagai petani, baik petani penggarap maupun buruh tani. Secara ekonomi warga Desa Kandang sapi, taraf kehidupannya meningkat, terbukti meningkatnya jumlah pedagang dan usaha industry kecil. Berikut

⁵ Ibid.

merupakan tabel yang menunjukkan jumlah masyarakat yang bekerja berdasarkan bidangnya:

Tabel 3.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Desa

Kandang sapi⁶

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	1441
2.	Buruh Tani	1132
3.	Pengusaha	29
4.	Buruh Bangunan	86
5.	Tukang Kayu	32
6.	Tukang Batu	43
7.	Penjahit	10
8.	Pedagang	183
9.	Veteran	3
10.	Pensiunan	10
11.	Pegawai Negeri	15
12.	ABRI	4
13.	Polisi	2
14.	Bidan	2
15.	Perawat	4

Sumber: Dokumentasi Desa Kandang sapi 2022

⁶ Ibid

3. Jumlah Penerima PKH

Jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Kandang sapi yaitu sejumlah 332 keluarga.⁷

B. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kandang sapi

Pelaksanaan kebijakan merupakan tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik karena kebijakan yang sudah dirancang tidak akan berfungsi tanpa dilaksanakan secara efektif. Kebijakan publik sendiri merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu, yang terdiri dari beberapa opsi untuk mencapai tujuan tersebut demi kepentingan masyarakat secara luas, dan bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Tahap implementasi ini melibatkan langkah-langkah konkret dalam penerapan kebijakan, seperti alokasi sumber daya, pelaksanaan program, dan evaluasi hasilnya. Evaluasi ini juga penting untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas kebijakan, serta untuk mengevaluasi masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaannya, dan melakukan penyesuaian kebijakan agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah contoh kebijakan publik yang bersifat substansial. Kebijakan substansial adalah kebijakan yang memfokuskan pada kebutuhan masyarakat sebagai subjek utama, yaitu memberikan perhatian pada masalah-masalah yang dihadapi oleh warga.

⁷ Tri Wahyuni, *Wawancara*, 25 Maret 2023.

PKH dapat dikategorikan sebagai kebijakan substansial karena dirancang sebagai respon terhadap masalah kemiskinan di masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di suatu daerah melalui pemberian bantuan dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan sosial dengan melalui berbagai tahapan pelaksanaan yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kandang sapi

Dalam hal ini, disajikan mengenai deskripsi dari tahapan-tahapan pelaksanaan program PKH di Desa Kandang sapi. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan 5 tahapan, yaitu adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, terdapat deskripsi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum program dilaksanakan. Data yang disajikan berupa proses-proses yang harus dilalui sebelum memulai program. Sesuai hasil wawancara dengan Tri Wahyu sebagai pendamping PKH di Desa Kandang sapi beliau menyatakan:

“PKH di Kandang sapi baru mulai tahun 2011, dulu itu pendampingnya hanya satu se-Kecamatan, kemudian tahun 2016 baru ditambah 5 orang. Kalau saya itu mulai jadi pendamping PKH tahun 2018. Awal sebelum saya menjadi pendamping itu ada bimbingan teknis, bimbingan pemantapan dan diklat. Bimbingan tersebut tergantung dari Kementerian Sosial, ada yang di Jogja, Solo, dan lainnya, kalau saya dulu di Dayu sana bimbingan dan diklatnya selama dua minggu.”⁸

⁸ Tri Wahyuni, *Wawancara*, 25 Maret 2023.

Hal serupa juga di sampaikan oleh Suryani yang juga sebagai pendamping PKH di Desa Kandang sapi. Beliau menyatakan: “Saya jadi pendamping PKH itu mulai tahun 2016, dulu sebelum jadi pendamping itu calon-calon pendamping harus mengikuti bimbingan teknis dan lain-lain dari Dinas Sosial terlebih dahulu. Dulu itu saya mengikuti BIMTEK di Solo bareng sama teman-teman perwakilan dari kecamatan.”⁹

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya langkah awal sebelum program PKH dilaksanakan adalah penetapan pendamping. Setelah itu pendamping akan mengikuti Bimbingan teknis, Bimbingan pemantapan dan diklat untuk melakukan tugas sebelum terjun ke lapangan sebagai pendamping PKH nantinya.

b. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi

Pada tahap pengumpulan data dan informasi ini, didapat data melalui proses penentuan Keluarga Penerima Manfaat. Sesuai hasil wawancara oleh Tri Wahyu:

“Data orang yang menerima bantuan itu bukan dari kita, tapi dari pusat atau Dinas Sosial. Saya sebagai pendamping hanya melakukan verifikasi yang sudah ada. Hal ini juga menjadi hambatan bagi saya dan teman-teman pendamping, karena orang-orang ingin menerima bantuan dan mengira bahwa pendamping itu yang menentukan apakah seseorang berhak menerima atau tidak. Padahal yang menentukan itu dari pusat, kita hanya melaksanakan tugas.”¹⁰

⁹ Suryani, Wawancara, 26 Maret 2023.

¹⁰ Tri Wahyuni, Wawancara, 25 Maret 2023.

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Suryani. Beliau mengatakan: “sebagai pendamping saya tidak bisa menentukan siapa yang berhak mendapat bantuan, tapi pendamping juga berpengaruh dalam proses pemutakhiran data yang nantinya dari pusat bisa menimbang apakah orang ini layak atau tidak menjadi penerima.”¹¹

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya untuk menentukan penerima bantuan, sebagai pendamping hanya dapat melakukan tugas memverifikasi data yang ada yang didapat dari pusat dan dalam proses pemutakhiran data untuk menimbang apakah penerima layak mendapat bantuan atau tidak.

c. Tahap Pelaksanaan

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan, yaitu sebagai berikut:

1) Pertemuan Kelompok

Pelaksanaan pertemuan kelompok sesuai hasil wawancara dari pendamping yaitu Tri Wahyuni beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Pertemuan kelompok itu dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Sebagai seorang pendamping, pada saat pertemuan kelompok harus bisa berupaya agar pelaksanaan pertemuan kelompok tersebut dapat berjalan. Jadi saya harus melakukan pendekatan kepada penerima bantuan agar pada saat pertemuan mereka merasa nyaman dan tidak canggung, jadi saat pemberian materi mereka bisa menerima dengan baik. Nah di pertemuan tersebut materi yang diberikan itu

¹¹ Suryani, *Wawancara*, 26 Maret 2023.

ada bermacam-macam, ada materi untuk mengelola keuangan dengan benar, untuk menjadi orang tua yang lebih baik dan mendidik anak dengan benar. Selain memberikan materi, sebagai seorang pendamping harus bisa memotivasi peserta.”¹²

Disambung pernyataan yang disampaikan oleh Suryani yang juga selaku pendamping PKH Desa Kandang sapi, beliau menyatakan:

“biasanya pertemuan kelompoknya rutin dilakukan setiap sebulan sekali di rumah ketua kelompok. Biasanya pertemuan tersebut selama satu setengah jam sampai dua jam. Disana para penerima bantuan kita motivasi dan kita bekal tentang berbagai hal seperti bagaimana sih menjadi orang tua yang baik, bagaimana mendidik anak, bagaimana cara ibu rumah tangga mengelola keuangan keluarga dengan benar dan yang lainnya. Nah kenapa pertemuan kelompok kok rutin dilakukan itu juga agar bisa merubah perilaku maupun pola pikir penerima bantuan.”¹³

Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pertemuan kelompok dilakukan sebulan sekali di rumah ketua kelompok. Dalam pertemuan tersebut pendamping akan menyampaikan materi kepada penerima bantuan mengenai bagaimana untuk menjadi orang tua yang baik yang bisa mendidik anaknya dengan benar, dan bagaimana mengelola keuangan dengan baik dan lainnya.

2) Pemutakhiran Data Sosial Ekonomi (PDSE)

Pemutakhiran data merupakan suatu proses pembaruan informasi mengenai anggota keluarga yang terdaftar dalam

¹² Tri Wahyuni, *Wawancara*, 25 Maret 2023.

¹³ Suryani, *Wawancara*, 26 Maret 2023.

program PKH, termasuk di dalamnya adalah perbaruan informasi mengenai nama kepala keluarga, anggota keluarga, alamat, struktur keluarga, jenjang pendidikan, fasilitas rumah, dan berbagai elemen lainnya yang terkait. Kegiatan pemutakhiran data sosial ekonomi mencakup verifikasi kondisi Sosial Ekonomi KPM yang sudah menerima bantuan program Keluarga Harapan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan kebenaran informasi mengenai kondisi sosial ekonomi keluarga penerima manfaat.¹⁴ Sesuai hasil wawancara dengan pendamping PKH Desa Kandangsapi yaitu Tri Wahyuni: “Pemutakhiran data akan dilakukan oleh pendamping PKH apabila terjadi perubahan data mengenai anggota keluarga yang menjadi peserta PKH. Seperti halnya saat ada anak dari peserta PKH yang awalnya sekolah di SDN 1 Kandangsapi kemudian Pindah Ke SDN 2 Kandangsapi.”

Dilanjutkan dengan pernyataan dari pendamping lainnya yaitu Suryani. Beliau menyatakan:

“Pemutakhiran data pertama adalah tahap lanjutan setelah calon peserta PKH diakui secara resmi sebagai anggota peserta PKH. Tahap ini dilakukan setelah proses validasi, dimana data yang diperlukan akan dilengkapi dan dikumpulkan untuk menjamin kelengkapan data hasil validasi. Nah Pemutakhiran data ini ada pemutakhiran rutin yang dilakukan setiap saat sesuai dengan kondisi terkini dari peserta. Dan pemutakhiran data besar yang dilakukan setiap tahun atau setiap tahun ajaran baru.”¹⁵

¹⁴ Tri Wahyuni, *Wawancara*, 25 Maret 2023

¹⁵ Suryani. *Wawancara*. 26 Maret 2023

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa Pemutakhiran data akan dilakukan oleh pendamping PKH apabila terjadi perubahan data mengenai anggota keluarga yang menjadi peserta PKH. Pemutakhiran data terbagi menjadi dua kategori, yaitu pemutakhiran yang dilakukan secara rutin setiap saat atau tiap bulan, dan pemutakhiran data besar-besaran yang dilakukan setiap tahun.

3) Verifikasi Komitmen

KPM PKH harus memenuhi kewajiban terkait pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sebagai syarat dalam program PKH. Pelaksana PKH bertanggung jawab untuk memeriksa dan memastikan bahwa KPM terdaftar dan menghadiri layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan pendamping PKH yaitu Tri Wahyuni. Beliau menyatakan:

“Setiap bulan itu, sebagai pendamping saya memiliki tugas untuk melakukan verifikasi komitmen dengan melakukan pengawasan. Saya harus mengunjungi sekolah, puskesmas, atau posyandu untuk memeriksa sejauh mana mereka aktif dalam melaksanakan kewajiban mereka. Dengan kata lain, kita harus memastikan bahwa mereka melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik dan tidak menyeleweng dari komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Seperti di sekolah bagaimana keadaan anak dari penerima bantuan, apakah aktif di sekolah atau tidak. Kemudian apakah memiliki tanggungan pembayaran atau tidak atau layak nggak sih seragam, sepatu tas dan lainnya. Kalau sampai bermasalahkan perlu dipertanyakan, untuk apa uang yang cair tersebut. Jadi disini saya harus menegur

KPM yang seperti ini Jangan sampai uang yang cair digunakan untuk keperluan yang diluar batas. “¹⁶

Dilanjutkan dengan wawancara yang dilakukan kepada Suryani. Beliau menyatakan:

“Setelah bergabung dengan PKH, peserta akan memiliki hak dan kewajiban. Haknya adalah mendapatkan bantuan, sedangkan beberapa kewajibannya yaitu menghadiri FDS, memeriksakan kesehatan ke puskesmas, dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Sebagai pendamping, tugas kita adalah melakukan verifikasi komitmen dengan cara mengunjungi langsung sekolah, puskesmas, atau posyandu di desa setiap bulan. Ini adalah tugas rutin kita sebagai pendamping. Dengan melakukan verifikasi komitmen, kita memastikan bahwa anggota PKH melaksanakan kewajiban mereka dengan baik dan memenuhi syarat untuk mendapatkan hak-hak yang telah diberikan kepada mereka.”¹⁷

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya verifikasi Komitmen bagi peserta PKH itu suatu kegiatan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan untuk mendapatkan data tentang anggota keluarga yang memenuhi komitmen tersebut. Persyaratan verifikasi komitmen meliputi daftar dan kehadiran di fasilitas-fasilitas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, tujuan dari verifikasi komitmen adalah untuk memastikan bahwa peserta PKH memenuhi kewajiban mereka dan memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari program tersebut.

¹⁶ Tri Wahyuni, *Wawancara*, 25 Maret 2023

¹⁷ Suryani, *Wawancara*, 26 Maret 2023

d. Tahap Evaluasi

Dengan melakukan evaluasi, akan diketahui kelemahan atau kekurangan dari program atau kebijakan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaannya, sehingga dapat dipastikan bahwa program atau kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada pendamping PKH yaitu Tri, beliau menyatakan:” Sekarang kan ya orang-orang itu pada nggak mau ketinggalan jaman yaa, bahkan orang tua sekarang pada nggak mau ketinggalan jaman. Banyak yang meniru gaya hidup yang wahh gitu, nahh dari penerima bantuan juga ada yang menirukan gaya hidup yang seperti itu dengan pakai hp yang android, terus ada yang ngredit motor padahal kemungkinan untuk memikirkan besok makan apa saja mereka masih bingung, tapi kok yaa seperti itu.”¹⁸

Disambung dengan pernyataan oleh Suryani. Beliau menyatakan: “kalau saya lihat itu alhamdulillahnya setelah adanya program ini, kepedulian masyarakat akan Pendidikan dari anaknya itu meningkat. Soalnya sebelumnya itu banyak yang langsung memilih bekerja dari pada sekolah, bahkan setelah SD sudah tidak sekolah itu juga hal yang biasa bagi mereka. Terus ya ada yang lulus SMP langsung kerja juga banyak.”¹⁹

¹⁸ Tri Wahyuni, *Wawancara*, 25 Maret 2023

¹⁹ Suryani, *Wawancara*, 26 Maret 2023

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam proses evaluasi, implementasi program itu terdapat kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu dengan adanya program PKH ini menjadikan meningkatnya kesadaran orang tua mengenai pentingnya Pendidikan dari anak-anaknya. Kekurangannya adalah terdapat beberapa penerima bantuan yang gaya hidupnya tidak ingin ketinggalan zaman dengan meniru gaya hidup ala masyarakat kota, padahal untuk kebutuhan sehari-hari saja mereka masih kekurangan.

e. Tahap Terminasi

Tahap terminasi menandakan berakhirnya suatu hubungan yang berkaitan dengan perubahan. Berakhirnya hubungan tersebut bisa disebabkan oleh berakhirnya masa tugas atau ketika masyarakat sudah siap untuk mandiri. Di dalam PKH akhir dari tahap implementasi ini dinamakan graduasi. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Tri Wahyuni selaku pendamping yaitu sebagai berikut:

“Graduasi itu adalah proses kelulusan dari program PKH. Saat ini, ada bentuk Graduasi Mandiri yaitu dimana KPM yang merasa sudah mandiri dapat mengajukan keluar dari program tersebut. Namun, KPM yang melakukan ini itu masih sangat sedikit, karena kebanyakan kan ya merasa nyaman dengan bantuan yang diterima setiap tahunnya. Ada juga Graduasi Paksa, yaitu ketika KPM dianggap sudah mampu, namun enggan untuk keluar dari program, maka akan dipaksa untuk keluar. Oleh karena itu, penting dari kita untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada KPM agar mereka bisa memahami bahwa Graduasi Mandiri adalah hal yang baik untuk masa depan mereka. Kalau graduasi paksa itu

darimpending bisa langsung memberi pemahaman kepada peserta itu bahwasanya mereka sudah tidak layak menerima bantuan, lalu setelah itu dari pendamping bisa menyetorkan nama peserta yang berhak digraduasi ke atasan sana”²⁰

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Suryani. Beliau menyatakan:

“Tahap akhir dari program PKH itu disebut Graduasi, disitu KPM dianggap tidak lagi termasuk dalam keluarga miskin berdasarkan kriteria tertentu, seperti mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, kesehatan, dan pendidikan, serta meningkatkan perekonomian mereka dengan membuka usaha sendiri. Dengan itu, KPM dianggap lulus dari program PKH dan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk terus menerima bantuan PKH. Kalau untuk tahapan graduasi itu biasanya dari pendamping memantau perkembangan ekonomi KPM yang awalnya dibekali pembelajaran saat pertemuan kelompok. Saat pertemuan kelompok kan peserta diajari bagaimana mengelola uang dengan benar, Bagaimana memulai usaha. Nah setelah itu kita memantau para peserta yang sudah mencoba memulai usaha, setelah itu sekiranya usaha mereka berjalan dengan lancar dan sudah mampu mencukupi berbagai kebutuhan sehari-hari atau sudah bisa mandiri maka selanjutnya kami berhak menggraduasi peserta tersebut.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Graduasi adalah proses kelulusan dari program PKH di mana KPM yang sudah memenuhi kriteria tertentu akan dinyatakan tidak lagi termasuk dalam keluarga miskin dan tidak memenuhi syarat untuk terus menerima bantuan PKH. Ada dua jenis graduasi, yaitu graduasi mandiri dan graduasi paksa. KPM yang merasa sudah mandiri dapat mengajukan keluar dari program, sementara KPM yang dianggap sudah mampu namun enggan keluar dari program

²⁰ Tri Wahyuni, *Wawancara*, 25 Maret 2023

²¹ Suryani, *Wawancara*, 26 Maret 2023

akan dipaksa untuk keluar. Tahapan Graduasi biasanya dilakukan dengan memantau perkembangan ekonomi KPM dan usaha yang mereka mulai setelah mendapatkan pelatihan dari pertemuan kelompok.

2. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Menurut Ekonomi Islam

Dalam Islam, untuk mengatasi kemiskinan dan mencapai kesejahteraan, program perlindungan sosial harus didasarkan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan menerapkan prinsip takaful serta harus menghindari dari segala bentuk ketidakadilan. Dalam penerapannya, program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat miskin harus memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

a. Adil

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terkait penerapan prinsip ekonomi Islam dalam penerapan PKH dengan prinsip keadilan sebagai berikut:

Wawancara dengan Tri selaku pendamping PKH:

“Di Desa Kandangsapi itu kan masyarakat miskinnya banyak kalo ndak salah kuranglebih ada 887 keluarga terus yang nerima bantuan itu hanya 332 keluarga, jadi karena banyaknya masyarakat miskin tersebut, masih ada yang belum mendapatkan manfaat dari program tersebut, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan mereka itu ya namanya orang desa kan ya merasa kok itu dapat terus dia tidak dapat padahal sama-sama miskinnya.”²²

²² Tri Wahyuni, *Wawancara*, 25 Maret 2023

Hal serupa juga disampaikan dalam wawancara dengan Suryani yang juga sebagai pendamping: “Dulu itu ada dari masyarakat yang mengadu kepada saya kok dia itu tidak dapat tetapi tetangganya dapat PKH. Sebenarnya kalau dilihat memang dia itu berhak menerima bantuan. Tetapi kan saya juga tidak bisa menjadikan dia sebagai penerima, karena yang mengatur sudah dari atasan sana.”²³

Kemudian disambung wawancara oleh Rusmini selaku penerima Bantuan: “Ya kalo aku sendiri senang karena dapet bantuan. Tapi aku yo kasian sama konco-konco seng gak oleh, padahal sama-sama nggak punya mbak. Ya aku mung bisa mendoakan buat konco-konco seng gak dapet bantuan PKH semoga bisa dapet bantuan lain PKH.”²⁴

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterapkan di Desa Kandangapi menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat yang tidak menerima bantuan padahal sama-sama miskin.

b. Tanggung Jawab

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terkait penerapan prinsip ekonomi Islam dalam penerapan PKH dengan prinsip tanggung jawab sebagai berikut:

²³ Suryani, *Wawancara*, 26 Maret 2023

²⁴ Rusmini, *Wawancara*, 26 Maret 2023

Wawancara dengan Tri wahyuni selaku pendamping: “kalau saya selama jadi pendamping PKH itu ya insyaallah sudah melakukan kewajiban saya jadi pendamping. Kalau waktunya pertemuan ya saya hadir, waktu pemantauan secara rutin terhadap penerima bantuan juga sudah saya lakukan sesuai dengan arahan.”²⁵

Hal serupa juga dikatakan oleh Suryani, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Kalau sudah diberi tanggung jawab itu ya sebisa mungkin tak laksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi semua hak dan kewajiban saya sebagai pendamping itu insyaallah sudah saya jalankan sebaik mungkin. Tapi kalau dari penerima bantuan itu terkadang masih susah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawabnya sebagai penerima. Ada beberapa orang itu yang tidak bisa mempertanggung jawabkan kegunaan uang bantuan dengan semestinya. Yang seharusnya uang itu diwajibkan untuk urusan pendidikan anaknya malah digunakan untuk shopping barang yang tidak perlu”.²⁶

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Sutini selaku penerima bantuan: “saya kan mendapat bantuan PKH karena punya anak yang masih sekolah. Biasanya uang bantuannya tak pakai buat keperluan sekolah anakku. Tapi terkadang pas uangnya sisa terus tak pakai belanja.”²⁷

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pendamping sudah melakukan kewajibannya sebagai pendamping tetapi dari penerima bantuan masih belum melakukan

²⁵ Tri Wahyuni, *Wawancara*, 25 Maret 2023

²⁶ Suryani, *Wawancara*, 26 Maret 2023

²⁷ Sutini, *Wawancara*, 26 Maret 2023

kewajibannya dengan baik yang terbukti masih adanya penggunaan dana bantuan untuk keperluan yang tidak semestinya.

c. *Takaful* (Jaminan Sosial)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terkait penerapan prinsip ekonomi Islam dalam penerapan PKH dengan prinsip *takaful* sebagai berikut:

Wawancara dengan Tri selaku pendamping: “dengan adanya jaminan sosial dari pemerintah berupa adanya PKH ini saya rasa dari masyarakat desa sini sangat bersyukur, karena mereka sangat merasa terbantu. Sehingga mereka bisa mengakses Pendidikan dan Kesehatan dengan mudah”²⁸

Hal serupa juga dikatakan dalam wawancara dengan Suryani: “adanya bantuan PKH dari pemerintah ini menurut saya sangat mendorong terciptanya hubungan yang baik antara masyarakat dengan pemerintah.”²⁹

Dilanjutkan wawancara dengan Cicik selaku penerima bantuan: “saya senang mbak dapet bantuan ini, saya merasa terbantu, karena yaa anak saya itu banyak dan belum ada yang kerja, masih sekolah dan balita. Pokoknya saya sangat berterima kasih kepada pemerintah karena sudah diberikan bantuan ini.”³⁰

Berdasarkan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya PKH yang diberikan pemerintah Kepada Desa

²⁸ Tri Wahyuni, *Wawancara*, 25 Maret 2023

²⁹ Suryani, *Wawancara*, 26 Maret 2023

³⁰ Cicik, *Wawancara*, 27 Maret 2023

Kandang sapi sangat membantu bagi masyarakat miskin dan dengan adanya PKH dapat mendorong terciptanya hubungan yang baik antara masyarakat dengan pemerintah.

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Miskin

Berdasarkan hasil wawancara oleh pendamping dan penerima bantuan mereka menjelaskan bahwa ada beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung untuk melakukan implementasi program tersebut.

1. Faktor Pendukung Implementasi Program PKH Di Desa Kandang Sapi

Dalam Implementasi PKH di Desa Kandang Sapi tentu ada faktor pendukungnya sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik. Berikut faktor pendukung dalam implementasi PKH di Desa Kandang Sapi:

a. Antusiasme yang Tinggi dari Peserta

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Tri selaku pendamping: “salah satu faktor pendukung saat implementasi program PKH yaitu masyarakat yang antusias karena akan mendapatkan bantuan, jadi mereka bersemangat untuk melakukan pertemuan.”³¹

³¹ Tri Wahyuni, *Wawancara*, 25 Maret 2023

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Suryani: “orang desa sini kan rata-rata dari kalangan masyarakat dengan ekonomi yang rendah, jadi begitu dengar mereka dapat bantuan mereka sangat antusias, jadi kalau disuruh untuk kumpulan mereka sangat semangat.”³²

Disambung dengan wawancara yang dilakukan kepada Rusmini selaku penerima:” waktu awal tau saya dapat bantuan ya saya senang mbak, terus pas disuruh pertemuan awal itu saya antusias ya soalnya seneng gitu.”³³

Berdasarkan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwsannya bahwa antusiasme masyarakat dalam menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu faktor pendukung dalam implementasi program tersebut. Masyarakat yang memiliki ekonomi rendah sangat senang dan semangat untuk mengikuti pertemuan dan mendapatkan manfaat dari program PKH.

b. Koordinasi yang Baik

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Tri: “dalam penerapan PKH ini koordinasi dari berbagai pihak yang terlibat sudah terjalin dengan baik. Seperti dari bidang pendidikan guru itu berperan untuk meningkatkan kualitas anak dan rutin melakukan absensi anak KPM.”³⁴

³² Suryani, *Wawancara*, 26 Maret 2023

³³ Rusmini, *Wawancara*, 26 Maret 2023

³⁴ Tri Wahyuni, *Wawancara*, 26 Maret 2023

Dilanjutkan wawancara dengan Suryani, beliau mengatakan: “Seperti yang disampaikan Mbak Tri tadi bahwa selain pada bidang Pendidikan, dalam bidang kesehatan juga sudah terkoordinasi dengan baik, yaitu adanya pemantauan kondisi Kesehatan Ibu hamil dan balita ketika ada posyandu.”³⁵

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya koordinasi antarpihak yang terlibat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sudah terjalin dengan baik. Terdapat koordinasi yang baik dalam bidang pendidikan, seperti peran guru untuk meningkatkan kualitas anak dan melakukan absensi anak KPM. Selain itu, terdapat juga koordinasi yang baik dalam bidang kesehatan, seperti pemantauan kondisi kesehatan ibu hamil dan balita di posyandu.

2. Faktor Penghambat Implementasi Program PKH Di Desa Kandang sapi

Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat dari implementasi PKH di Desa Kandang sapi yaitu sebagai berikut:

a. Faktor pendidikan dan usia

Berdasarkan wawancara dengan Tri selaku pendamping. Beliau menyatakan sebagai berikut:

“Banyak dari KPM PKH yang memiliki usia yang sudah lanjut dan pendidikan mereka sangat rendah, bahkan ada juga yang tidak bersekolah. Jadi mereka itu sering lupa dengan informasi yang diberikan dan sulit untuk mengingatnya, jadi butuh

³⁵ Suryani, Wawancara, 26 Maret 2023

perwakilan KPM yang bisa menyampaikan informasi dari pendamping agar lebih mudah dipahami oleh mereka.”³⁶

Kemudian dilanjut dengan wawancara oleh Suryani: “yang sulit itu lansia mbak, kan usianya yang sudah tua jadi untuk memahami materi itu mereka kesulitan. Selain itu disabilitas juga sulit, karena ya mereka punya keterbatasan. Jadi saya harus ngasih informasi ke keluarga mereka.”³⁷

Dilanjut dengan wawancara kepada Sutini sebagai penerima. Beliau mengatakan:” Aku ki wong bodo mbak, sekolah SD aja tidak lulus. Jadi kalau ada materi-materi saya itu susah nangkepnya, jadi kudu pelan-pelan baru bisa paham”.³⁸

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya rendahnya Pendidikan dari KPM menjadi hambatan dalam pelaksanaan PKH. Selain itu hambatan yang lain adalah karena lansia dan penyandang disabilitas karena kondisi yang tidak memungkinkan tersebut pendamping harus menyampaikan informasi kepada anggota keluarga KPM.

b. KPM yang Tidak Taat Peraturan

Berdasarka wawancara dengan Tri selaku pendamping:” Terkadang itu Mbak, ada KPM yang tidak pernah hadir dalam kegiatan sosialisasi, sehingga mereka iyu tidak mengetahui informasi apa saja yang disampaikan dalam setiap pertemuan. Selain itu, sering

³⁶ Tri Wahyuni, *Wawancara*, 25 Maret 2023

³⁷ Suryani, *Wawancara*, 26 Maret 2023

³⁸ Sutini, *Wawancara*, 26 Maret 2023

terjadi disinformasi, terus jika terjadi kesalahan pada KPM, mereka cenderung menyalahkan pendamping, padahal sebenarnya mereka sendiri yang tidak pernah menghadiri sosialisasi.”³⁹

Kemudian dilanjutkan dengan wawancara oleh Suryani: “Hambatan yang mungkin terjadi adalah ketika ada KPM yang tidak memahami materi yang dijelaskan oleh pendamping, dan justru malah asyik mengobrol dengan KPM lainnya.”⁴⁰

Selanjutnya adalah wawancara dari Cicik:” Tidak ada hambatan mbak kalau dari pendamping sejauh saya menjadi penerima PKH, pendamping juga menjelaskan dengan baik untuk kegiatan sosialisasi. Tapi dari teman-teman yang tidak bisa menjaga komitmennya menjadi KPM. Ada yang gak datang waktu sosialisasi padahalkan sebulan cuma sekali tok lho.”⁴¹

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Beberapa hambatan yang disebutkan adalah KPM yang tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi sehingga tidak memahami informasi yang disampaikan, terjadinya disinformasi, dan kesalahan dalam penerapan PKH yang seringkali disalahkan pada pendamping. Selain itu, hambatan lain yang disebutkan adalah KPM yang kurang memahami materi yang disampaikan oleh pendamping dan lebih asyik berbincang dengan KPM lain. Namun, dari perspektif Cicik sebagai penerima, tidak ada hambatan dalam hal penjelasan dari

³⁹ Tri Wahyuni, *Wawancara*, 25 Maret 2023

⁴⁰ Suryani, *Wawancara*, 26 Maret 2023

⁴¹ Cicik, *Wawancara*, 27 Maret 2023

pendamping, tetapi lebih pada kurangnya komitmen dari beberapa teman dalam menjalankan PKH.

D. Dampak Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Kandangspi

Dalam sebuah implementasi pastinya terdapat dampak positif dan juga negatif. Seperti wawancara terhadap penerima bantuan PKH yaitu sebagai berikut:

Wawancara yang dilakukan dengan Rusmini:”untuk dampak Positifnya ya bisa membantu mengurangi pengeluaran keluarga mbak. Kalau dampak negatifnya saya menjadi ketergantungan sama bantuan ini”⁴²

Wawancara dengan Sutini selaku penerima: “kalau positifnya itu yaa pendidikan dari anak saya sekarang terjamin. Biasanya itu saya rada susah mencari biaya untuk menyekolahkan anak. Tapi dengan adanya bantuan ini saya merasa sangat terbantu. Kalau dampak negatifnya itu tetangga yang tidak dapat bantuan podo meri mbak alias pengen dapet.”⁴³

Dilanjutkan wawancara dengan Cicik: “dampak positif yang saya rasakan itu dengan adanya pertemuan kelompok PKH saya jadi bisa belajar banyak dari apa yang disampaikan pendamping, kalau negatifnya

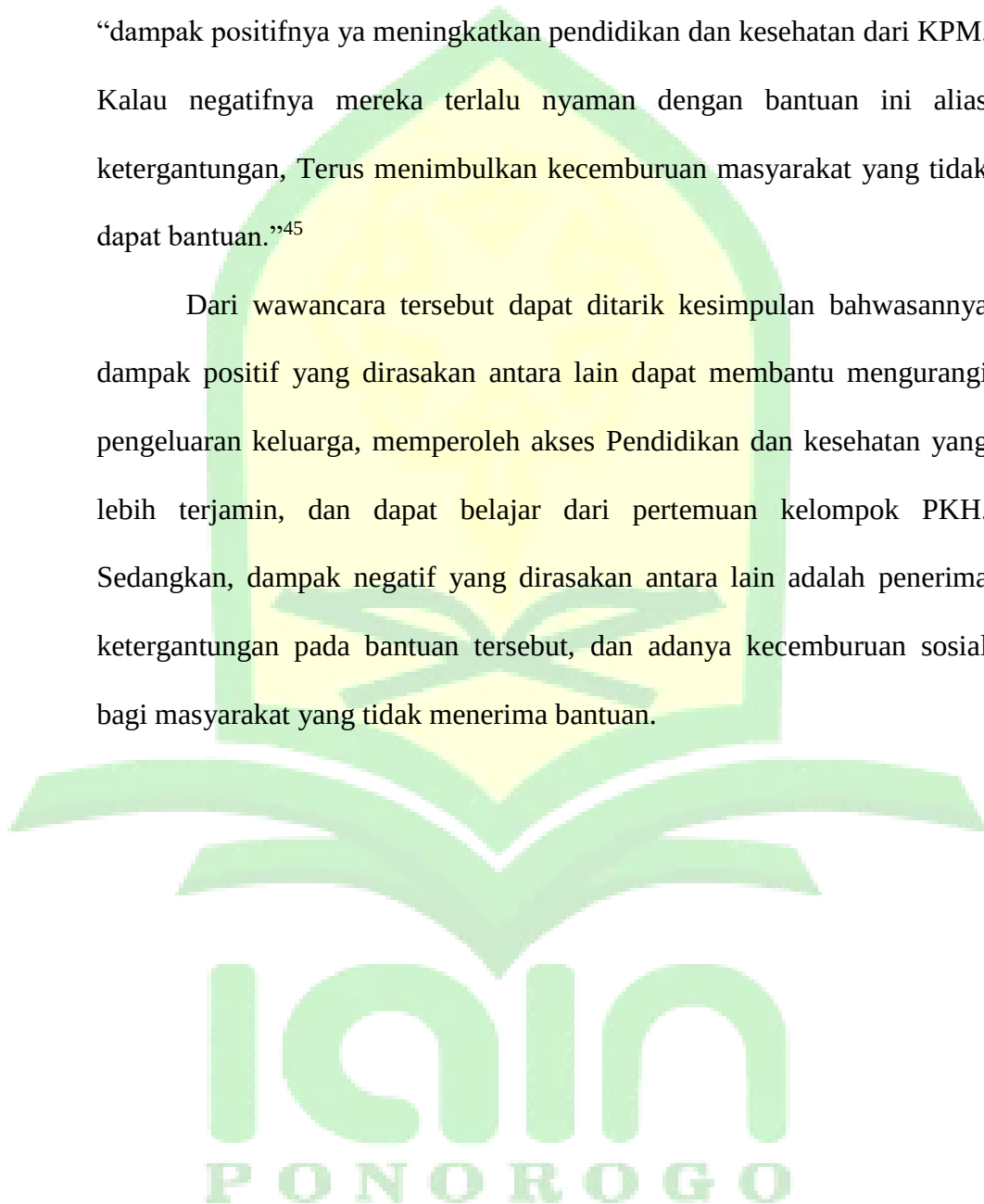
⁴² Rusmini, *Wawancara*, 26 Maret 2023

⁴³ Sutini, *Wawancara*, 26 Maret 2023

apa yaa, mungkin saya selalu berharap bantuannya segera turun jika terkadang pembagian bantuannya molor dari waktu biasanya.”⁴⁴

Dilanjutkan wawancara kepada Tri selaku pendamping PKH: “dampak positifnya ya meningkatkan pendidikan dan kesehatan dari KPM. Kalau negatifnya mereka terlalu nyaman dengan bantuan ini alias ketergantungan, Terus menimbulkan kecemburuan masyarakat yang tidak dapat bantuan.”⁴⁵

Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dampak positif yang dirasakan antara lain dapat membantu mengurangi pengeluaran keluarga, memperoleh akses Pendidikan dan kesehatan yang lebih terjamin, dan dapat belajar dari pertemuan kelompok PKH. Sedangkan, dampak negatif yang dirasakan antara lain adalah penerima ketergantungan pada bantuan tersebut, dan adanya kecemburuan sosial bagi masyarakat yang tidak menerima bantuan.



⁴⁴ Cicik, *Wawancara*, 27 Maret 2023

⁴⁵ Tri Wahyuni, *Wawancara*, 25 Maret 2023

BAB IV

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN

A. Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kandang sapi untuk Mensejahterakan Masyarakat Miskin

1. Tahapan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan dalam melakukan kegiatan sehingga pelaksana kebijakan bisa mengetahui apakah kebijakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan tersebut diaplikasikan dengan berbagai bentuk program yang di bangun oleh pembuat kebijakan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tahap implementasi adalah tahap yang melibatkan langkah-langkah konkret dalam penerapan kebijakan, seperti alokasi sumber daya, pelaksanaan program, dan evaluasi hasilnya.¹ Dalam hal ini dijelaskan mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kandang sapi, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam implementasi program PKH di Desa Kandang sapi, terdapat lima tahapan yang harus dilalui, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data dan informasi, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap terminasi. Pada tahap pelaksanaan, terdapat tiga program utama yang

¹ Wayan Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: Kencana, 2011), 472.

harus dijalankan, yakni pertemuan kelompok (FDS), pemutakhiran data sosial ekonomi, dan verifikasi komitmen.

a. Tahapan persiapan

Sebelum dilaksanakan program pelaksanaan kebijakan terlebih dahulu harus melakukan persiapan untuk pengkajian program serta mempersiapkan apa yang dibutuhkan dan diperlukan ketika program akan dilaksanakan dengan menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas.² Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH langkah awal sebelum program PKH dilaksanakan adalah penetapan pendamping. Setelah itu pendamping akan mengikuti Bimbingan teknis, Bimbingan pemantapan dan diklat untuk melakukan tugas sebelum terjun ke lapangan sebagai pendamping PKH nantinya.

Menurut analisis peneliti proses pelaksanaan sudah sesuai dengan teori bahwa peran pendamping merupakan tahap yang penting dalam memulai mempersiapkan terlaksananya program PKH. Pendamping melakukan persiapan dan melalui berbagai jenis pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program PKH. Pelatihan pendamping dikatakan penting karena dalam pelatihan tersebut pendamping PKH perlu melakukan bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan lainnya, karena dapat membantu meningkatkan keterampilan dan kemampuan pendamping dalam mengelola

²Soenarko, *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebujaksanaan Pemerintah* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2000), 250.

program PKH. Bimbingan teknis dapat memberikan pendamping PKH kesempatan untuk memperoleh informasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang kebijakan dan prosedur program, serta meningkatkan keterampilan teknis yang dibutuhkan dalam mengelola program. Jadi melalui pelatihan tersebut diharapkan pendamping nantinya bisa mengelola program dengan baik sehingga tujuan program dapat tercapai.

b. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi.

Pengumpulan data dilakukan dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi dari pihak yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas, dimana menggambarkan secara umum hal yang terkait dengan subjek pembahasan.³ Dari hasil wawancara dengan pendamping untuk menentukan penerima bantuan, sebagai pendamping hanya dapat melakukan tugas memverifikasi data yang ada yang didapat dari pusat dan dalam proses pemutakhiran data untuk menimbang apakah penerima layak mendapat bantuan atau tidak.

Menurut analisis peneliti dalam tahap pengumpulan data dan informasi sudah sesuai dengan teori yaitu adanya kerjasama dari pusat dalam menentukan penerima bantuan dengan peran pendamping dalam memverifikasi data yang ada agar bantuan tepat sasaran bagi penerima yang memang layak mendapatkan. Tahap ini

³ Ibid.

sangat penting karena pada tahap ini menentukan ketepatan sasaran dari penerima bantuan. Pentingnya pendamping dalam memverifikasi data karena data yang akurat dan valid sangat penting dalam mengidentifikasi keluarga penerima manfaat kemudian menentukan jumlah bantuan yang akan diberikan, dan memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diterima oleh keluarga yang memenuhi kriteria serta memastikan bahwa program PKH dapat memberikan manfaat yang diharapkan kepada keluarga penerima manfaat.

c. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan masing-masing pihak yang terkait melaksanakan kegiatan program dalam rangka mencapai keberhasilan program dengan mengikuti segala ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam program tersebut.⁴ Dalam tahap pelaksanaan terdapat tiga program yaitu:

1) Pertemuan kelompok (FDS).

Dari hasil wawancara pertemuan kelompok dilakukan sebulan sekali di rumah ketua kelompok. Dalam pertemuan tersebut pendamping akan menyampaikan materi kepada penerima bantuan mengenai bagaimana untuk menjadi orang tua yang baik yang bisa mendidik anaknya dengan benar, dan bagaimana mengelola keuangan dengan baik dan lainnya.

⁴ Ibid.

Menurut analisis dari peneliti dalam tahap pertemuan kelompok sudah sesuai dengan teori karena adanya pertemuan kelompok ini bertujuan agar tujuan program tercapai. Jadi Pertemuan kelompok ini sangat bermanfaat bagi KPM agar mereka bisa merubah perilaku dan pola pikir mereka, karena disana mereka diajari atau dibekali berbagai materi seperti bagaimana untuk menjadi orang tua yang baik yang bisa mendidik anaknya dengan benar, dan bagaimana mengelola keuangan dengan baik dan lainnya. Selain itu dari pendamping juga harus bisa memberi motivasi kepada penerima manfaat. Selain itu dalam pertemuan kelompok KPM memperoleh informasi penting terkait program PKH, seperti jadwal pencairan bantuan, informasi tentang kesehatan dan gizi, serta edukasi tentang keterampilan atau wawasan baru. Jadi amat sangat disayangkan apabila penerima manfaat tidak mengikuti pertemuan kelompok tersebut.

2) Pemutakhiran Data Sosial Ekonomi (PDSE)

Dari hasil wawancara Pemutakhiran data akan dilakukan oleh pendamping PKH apabila terjadi perubahan data mengenai anggota keluarga yang menjadi peserta PKH. Pemutakhiran data terbagi menjadi dua kategori, yaitu pemutakhiran yang dilakukan secara rutin setiap saat atau tiap bulan, dan pemutakhiran data besar-besaran yang dilakukan setiap tahun. Menurut analisis

peneliti Tujuan dari pemutakhiran data tersebut adalah untuk memperbarui dan memantau kondisi sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setelah bergabung dengan program serta memperhatikan adanya perubahan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi dari kesimpulan diatas dapat diketahui bahwasanya PDSE ini sangat penting karena PDSE memastikan bahwa data KPM PKH diperbarui secara berkala sehingga dapat menghindari adanya kesalahan data yang mungkin terjadi pada saat awal pendataan KPM PKH.

3) Verifikasi komitmen

Verifikasi Komitmen bagi peserta PKH itu suatu kegiatan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan untuk mendapatkan data tentang anggota keluarga yang memenuhi komitmen tersebut. Persyaratan verifikasi komitmen meliputi daftar dan kehadiran di fasilitas-fasilitas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.⁵

Menurut analisis dari peneliti Dalam hal ini, tujuan dari verifikasi komitmen adalah untuk memastikan bahwa peserta PKH memenuhi kewajiban mereka dan memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari program tersebut. Selain itu perlunya verifikasi komitmen oleh peserta dapat merubah perilaku dari KPM karena dengan memastikan bahwa KPM PKH benar-benar

⁵ Ibid.

menjalankan komitmen yang telah disepakati, maka KPM PKH akan lebih terpacu untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan anak, dan meningkatkan taraf hidup. Selain itu dengan adanya tahap verifikasi komitmen dari peserta diharapkan agar tujuan dari PKH dapat tercapai.

d. Tahap evaluasi

Dengan adanya evaluasi maka suatu program atau kebijakan akan dapat diketahui kelemahan atau kekurangannya sejak direncanakan sampai pelaksanaannya untuk mencapai tujuannya memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶ Menurut wawancara, dalam proses evaluasi, implementasi program itu terdapat kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu dengan adanya program PKH ini menjadikan meningkatnya kesadaran orang tua mengenai pentingnya Pendidikan dari anak-anaknya. Kekurangannya adalah terdapat beberapa penerima bantuan yang gaya hidupnya tidak ingin ketinggalan zaman dengan meniru gaya hidup ala masyarakat kota, padahal untuk kebutuhan sehari-hari saja mereka masih kekurangan.

Menurut analisis dari peneliti dengan adanya masalah tersebut mungkin dari pendamping harus lebih tegas dalam mengarahkan oknum-oknum tersebut dalam menggunakan uang bantuan sesuai kegunaanya. Agar tujuan PKH dalam

⁶ Ibid.

mensejahterakan masyarakat bisa terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan.

e. Tahap terminasi

Terminasi merupakan akhir dari suatu relasi perubahan. Berakhirnya suatu relasi perubahan dapat terjadi karena waktu bertugas sudah berakhir atau masyarakat sudah untuk mandiri.⁷ Dalam PKH nama lain dari terminasi ini disebut Graduasi. Dalam hasil wawancara Graduasi adalah proses kelulusan dari program PKH di mana KPM yang sudah memenuhi kriteria tertentu akan dinyatakan tidak lagi termasuk dalam keluarga miskin dan tidak memenuhi syarat untuk terus menerima bantuan PKH. Ada dua jenis graduasi, yaitu graduasi mandiri dan graduasi paksa. KPM yang merasa sudah mandiri dapat mengajukan keluar dari program, sementara KPM yang dianggap sudah mampu namun enggan keluar dari program akan dipaksa untuk keluar.

Menurut analisis peneliti penting bagi pendamping untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada KPM agar mereka bisa memahami bahwa graduasi mandiri adalah hal yang baik untuk masa depan mereka. Tahapan Graduasi biasanya dilakukan dengan memantau perkembangan ekonomi KPM dan usaha yang mereka mulai setelah mendapatkan pelatihan dari pertemuan kelompok.

⁷ Ibid.

2. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Menurut Ekonomi Islam

Dalam perspektif islam, kesejahteraan manusia akan terwujud manakala sendi-sendi kehidupan ditegakkan di atas nilai-nilai dalam ekonomi islam.⁸ Untuk mengatasi kemiskinan dan mencapai kesejahteraan, program perlindungan sosial harus didasarkan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan menerapkan prinsip *takaful* serta harus menghindari dari segala bentuk ketidakadilan. Dalam penerapannya, program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat miskin harus memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

a. Keadilan

Keadilan dapat dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran.⁹ Dari hasil wawancara mengenai prinsip *adil* dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kandang sapi bahwasanya PKH di Desa Kandang sapi menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat yang tidak menerima bantuan padahal sama-sama miskin.

⁸ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013), 63.

⁹ Ibid.

Menurut analisis dari peneliti dalam prinsip keadilan disini belum sesuai dengan teori karena masih adanya kecemburuan bagi masyarakat yang tidak menerima. Meskipun dianggap berhasil dalam memberikan manfaat dana bantuan kepada penduduk miskin. Namun, ada beberapa keluarga miskin yang belum menerima manfaat dari program tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa program PKH belum merata dalam memberikan manfaat kepada semua keluarga miskin di Desa Kandang sapi. Terbukti dengan jumlah keluarga miskin di Kandang sapi yaitu sebanyak 887 keluarga namun yang mendapatkan bantuan PKH hanya 332 keluarga saja. Fakta bahwa masih ada keluarga miskin yang belum menerima manfaat dari program PKH menunjukkan bahwa program tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Ini menunjukkan bahwa implementasi program PKH masih perlu ditingkatkan agar bisa lebih merata dan adil dalam memberikan manfaat kepada semua keluarga miskin di Desa Kandang sapi.

Dalam hal ini, pemerintah dan bawahannya yang terkait perlu terus melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap program PKH. Mereka perlu memastikan bahwa program tersebut dapat mencapai seluruh keluarga miskin di Desa Kandang sapi dan memberikan manfaat yang adil dan merata. Hal ini diharapkan dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara keseluruhan dan membantu mengurangi tingkat kemiskinan di desa tersebut.

b. Tanggungjawab

Tanggung jawab merupakan sifat yang sangat penting bagi seluruh umat manusia untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan, juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.¹⁰ Dari hasil wawancara mengenai prinsip tanggung jawab bahwasanya pendamping sudah melakukan kewajibannya sebagai pendamping tetapi dari penerima bantuan masih belum melakukan kewajibannya dengan baik yang terbukti masih adanya penggunaan dana bantuan untuk keperluan yang tidak semestinya.

Menurut analisis dari peneliti dalam penerapan tanggung jawab Program Keluarga Harapan di Desa Kandang sapi belum sesuai dengan teori dikarenakan dalam penerapan PKH belum berjalan dengan baik karena penerima bantuan belum bisa bertanggung jawab terhadap penggunaan dana. Meskipun dari pendamping sudah melakukan kewajibannya, namun masih terdapat penerima bantuan yang tidak bertanggung jawab dalam penggunaan dana bantuan.

¹⁰ Ibid.

Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman penerima bantuan mengenai tanggung jawab mereka dalam program tersebut. Selain itu, perlu juga dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana bantuan agar program PKH dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Karena program ini diberikan pemerintah bukan secara cuma-cuma, karena program ini adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi di negara ini.

c. *Takaful* (Jaminan Sosial)

Takaful merupakan wujud atas dasar kepedulian masyarakat atau kebijakan pemerintah dalam hal merealisasikan kepeduliannya terhadap rakyat. Adanya jaminan sosial dimasyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.¹¹ Dalam wawancara peneliti mengenai prinsip *Takaful* diperoleh bahwasanya PKH yang diberikan pemerintah Kepada Desa Kandangsapi sangat membantu bagi masyarakat miskin dan dengan adanya PKH dapat mendorong terciptanya hubungan yang baik antara masyarakat dengan pemerintah.

¹¹ Ibid.

Menurut analisis dari peneliti dalam penerapan prinsip *Takaful* pada PKH di Desa Kandang sapi sudah sesuai dengan teori dan hal tersebut menunjukkan bahwa konsep *takaful* sudah terpenuhi melalui adanya program jaminan sosial yaitu PKH. Dalam mencapai kesejahteraan dan hubungan yang harmonis antara individu, masyarakat dan pemerintah, penting bagi pemerintah untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, sehingga kesenjangan sosial dapat dihilangkan dan masyarakat miskin dapat hidup dengan layak. PKH merupakan bentuk bantuan bersyarat yang diberikan pemerintah guna mensejahterakan masyarakat miskin dan untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya program ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kaum fakir miskin. Pemerintah berusaha agar kebutuhan mereka terpenuhi melalui program jaminan sosial ini khususnya dalam hal kesehatan dan pendidikan.

B. Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di Kandang sapi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin

Berdasarkan hasil wawancara pada paparan data diatas, dapat peneliti analisis bahwasannya terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi PKH di Desa Kandang sapi, adapun faktor pendukung pada implementasi PKH adalah sebagai berikut:

Antusiasme masyarakat merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH).

Dapat dilihat bahwa masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi rendah sangat bersemangat dan senang untuk terlibat dalam program ini. Hal ini menunjukkan bahwa PKH memberikan manfaat yang signifikan bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan, sehingga mereka merasa termotivasi untuk mengikuti pertemuan.

Antusiasme masyarakat merupakan hal penting dari keberhasilan program PKH. Karena semakin tinggi antusiasme masyarakat, semakin besar kemungkinan program tersebut akan sukses dalam membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan. Oleh karena itu, program PKH harus terus mempromosikan manfaatnya dan membuat masyarakat untuk terlibat aktif dalam program ini, sehingga dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Selain itu faktor pendorong dari implementasi PKH adalah karena Melalui koordinasi yang baik antar pihak, program PKH dapat memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Seperti adanya Koordinasi antara guru dan pendamping PKH dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak dan memantau absensi mereka di sekolah, sementara koordinasi antara posyandu dan pendamping PKH dapat membantu memantau kondisi kesehatan ibu hamil dan balita.

Oleh karena itu, penting bagi PKH untuk terus meningkatkan koordinasi antar pihak dan memastikan bahwa tujuan program dapat

tercapai secara efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan PKH sangat bergantung pada koordinasi yang baik antar berbagai pihak yang terlibat dalam program. Dengan koordinasi yang baik maka tujuan program akan mudah tercapai.

Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat dalam implementasi PKH di Desa Kandang sapi, diantaranya adalah karena rendahnya tingkat pendidikan dari KPM menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. KPM dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung memiliki kesulitan dalam memahami informasi yang diberikan oleh pendamping, sehingga membutuhkan perwakilan PKH yang dapat membantu menyampaikan informasi yang lebih mudah dipahami.

Adapun hambatan yang lain yaitu lansia dan penyandang disabilitas. Kondisi mereka yang tidak memungkinkan membuat mereka kesulitan dalam memahami materi yang diberikan. Oleh karena itu, pendamping harus menyampaikan informasi kepada anggota keluarga KPM agar dapat dipahami dengan baik. Dengan demikian, hal tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi kemampuan KPM dalam memahami informasi yang diberikan oleh pendamping. Rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi lansia atau disabilitas menjadi hambatan yang memerlukan solusi agar program tersebut dapat berjalan dengan efektif.

Selain itu hambatan yang lain dalam pelaksanaan PKH yang Pertama, beberapa KPM tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi sehingga tidak memahami informasi yang disampaikan. Hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya disinformasi atau informasi yang salah yang beredar di antara KPM, yang kemudian jika terjadi sesuatu seringkali yang disalahkan adalah pendamping. Kedua beberapa KPM kurang memahami materi yang disampaikan oleh pendamping dan lebih asyik berbincang dengan KPM lain. Hal ini terlihat kurangnya perhatian dan keterlibatan dari KPM dalam program tersebut. Meskipun tidak ada hambatan dalam segi pendamping, tetapi, hambatan terletak pada kurangnya komitmen dari beberapa teman dalam menjalankan PKH. Hal ini menunjukkan bahwa kesuksesan program PKH tidak hanya bergantung pada upaya dari pendamping, tetapi juga bergantung pada keterlibatan aktif dari KPM sendiri supaya tujuan program dapat tercapai.

C. Analisis Dampak Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kandangspi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin

Dari hasil wawancara pada paparan data diatas, maka peneliti dapat menganalisis bahwa dalam implementasi suatu program khususnya Program Keluarga Harapan di desa Kandangspi terdapat dampak positif dan negatifnya.

Dengan adanya bantuan dari PKH, keluarga penerima manfaat dapat mengurangi pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, adanya PKH, KPM juga dapat memperoleh akses Pendidikan dan kesehatan yang lebih terjamin, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas keluarga. Selain itu, PKH juga mengadakan pertemuan kelompok untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada penerima manfaat, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dapat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jadi amat sangat disayangkan apabila penerima bantuan tidak memanfaatkan fasilitas yang diberikan dalam program PKH ini. Karena fasilitas-fasilitas tersebut sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, ada juga dampak negatif yang muncul, yaitu penerima menjadi ketergantungan pada bantuan tersebut. Ketergantungan ini dapat mempengaruhi motivasi dan inisiatif keluarga untuk berusaha mandiri. Selain itu, ada juga kecemburuan sosial yang muncul dari masyarakat yang tidak menerima bantuan. Kecemburuan sosial ini bisa saja memicu konflik dan memperburuk hubungan sosial di antara masyarakat. Dengan hal tersebut sebaiknya pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat dari program bantuan tersebut. Dengan begitu, masyarakat yang tidak menerima bantuan dapat memahami bahwa program bantuan bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan bukan untuk membuat mereka merasa diabaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi PKH di Desa Kandang sapi terdiri dari lima tahapan yaitu persiapan, pengumpulan data dan informasi, pelaksanaan, evaluasi, dan terminasi. Pada tahap pelaksanaan, ada tiga program utama yang akan dijalankan yaitu pertemuan kelompok (FDS), pemutakhiran data sosial ekonomi (PDSE), dan verifikasi komitmen. Tahap persiapan merupakan hal penting dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program PKH, termasuk pelatihan bagi pendamping yang ditunjuk. Tahap pengumpulan data dan informasi yaitu verifikasi data yang ada yang dari pusat, yang kemudian diolah untuk menentukan kelayakan dari penerima program. Tahap implementasi meliputi pertemuan kelompok, pemutakhiran data sosial ekonomi, dan verifikasi komitmen. Tahap evaluasi yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program PKH. Terakhir, tahap terminasi meliputi dua jenis graduasi yaitu graduasi mandiri dan graduasi paksa.

Sedangkan implementasi program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kandang sapi dengan pendekatan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu meskipun program PKH dianggap berhasil memberikan manfaat kepada masyarakat miskin, namun masih terdapat kendala dalam menjalankan

prinsip keadilan dan tanggung jawab. Jadi implementasi PKH di Desa Kandangsapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dikatakan belum tercapai dari segi keadilan dan pertanggung jawaban, tetapi dari penerapan prinsip takaful disini dianggap sudah tercapai dalam implementasi PKH di Desa Kandangsapi untuk mensejahterakan masyarakat miskin.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi PKH di Desa Kandangsapi yaitu Antusiasme masyarakat dalam menjalankan program dan karena adanya koordinasi yang baik antar berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi PKH. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi PKH adalah karena rendahnya tingkat pendidikan dari KPM dan karena Sebagian penerima bantuan ada yang lansia dan disabilitas sehingga karena kondisi mereka yang tidak memungkinkan membuat susah dalam menangkap materi.
3. Dampak positif dan negatif dalam implementasi PKH di Desa Kandangsapi yaitu dapat mengurangi pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan dan mereka dapat memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang lebih terjamin serta mereka mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan dari pertemuan kelompok. Sedangkan dampak negatifnya adalah penerima menjadi ketergantungan pada bantuan tersebut dan terjadinya kecemburuan sosial bagi masyarakat yang tidak menerima bantuan PKH.

B. Saran

1. Kepada Pendamping PKH untuk lebih meningkatkan kinerjanya agar pelaksanaan PKH lebih efektif lagi.
2. Kepada KPM PKH Desa Kandang sapi, hendaklah selalu memenuhi komitmen yang sudah disepakati serta menggunakan bantuan untuk hal-hal yang semestinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Noor, Ruslan. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah upayah Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Arlina, Muhammad Guntur, Umar Nain. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Lilirawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone (Studi Kasus: PKH Bidang Pendidikan). *Jurnal Ilmu Sosiologi Dialektika Kontemporer*, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Ayu, Kartika, Sutomo, Kholiq Azhari. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Puncakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi Ekuilibrium*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Ayu Virgoreta, Dyah, Ratih Nur P., Suwondo. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 12, 2015.
- Badan Pusat Statistik. *Indikator kesejahteraan Rakyat 2022*. Jakarta: CV Daffa Putra. 2022.
- Diana, Ridho. *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau)*". SKRIPSI. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2018.
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Fitrah, Muh. & Lutfiyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Fuad Chalil, Zaki. *Pemerataan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- <https://sendangsari.bantulkab.go.id/first/artikel/724-14-KRITERIA-MASYARAKAT-MSKIN-MENURUT-STANDAR-BPS> diakses pada tanggal 15 Desember 2022

- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Jannah, Roudhotul. *Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawatrate Jakarta Timur*. SKRIPSI. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2019.
- Kartiawati. *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Study pada Peserta PKH Kampung Bonglai Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan*. SKRIPSI. Lampung: IAIN Raden Intan. 2017.
- Khomsan, Ali dkk. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Kusumawati, Eny. *Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan PKH Untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)*. SKRIPSI. Semarang: UIN Walisongo. 2019.
- Linjamsos, Dirjen. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Edisi Tahun 2021*. Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2021.
- Mahaeni, Aain, et. al. "Evaluasi Program-program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali". *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Vol. X. No. 1:8-18. 4 Juli 2014.
- Mahmudah, Siti Nur, Fath Eryan dan Badrus Sholeh. "Pengaruh Zakat Maal Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahiq Di Yatim Mandiri Kediri". *Jurnal al-Hikmah*, Vol. 6, No. 1 (2018).
- Notowidagdo, Rohiman. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Novieta, Enda, Sujianto dan Harapan Tua. "Efektivitas Program keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 15, No. 2 (2019), 190.
- Nurhidayati, Lisa. *Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Aceh Barat Daya*, SKRIPSI. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.
- Parsons, Wayan. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana, 2011.

Peraturan Menteri Sosial RI NO. 1 Tahun 2018.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: A- Ruzz Media, 2016.

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Rahmania. *Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Prov. Jambi*. SKRIPSI. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin. 2020.

Rohmah, Siti. *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Suku Dinas Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Lagoa Jakarta Utara*. SKRIPSI. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Rukminto Hadi, Isbandi. *Kesejahteraan Sosia..* Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2015.

Saragi, Siswati. Maria Ulfa, Nur Ambia Arma. “Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak”. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, Vol. VIII, No. 1, 2021.

Sholikhah, Dkk. “Peran lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)”. *Jurnal Of Islamic Philanthropy and Disaster*, Vol. 1, No. 1 (2021).

Soenarko. *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebujaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2000.

Soetomo. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Suyanti. *Efektivitas Progam Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Besuki Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)*. SKRIPSI. Purwokerto: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri. 2022.

Syauqi Beik, Irfan dan Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016.

Tawakal, Lingga, Supartono. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Salah Satu Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. Vol. 3 No. 2.

Tonny Nasdian, Fredian. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Usman Ismail, Asep. *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.

Utomo, Dedy, Abdul Hakim, Heru Ribawanto. "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 1.

UUD 1945 pasal 1 ayat (9)

UUD 1945 pasal 34 ayat (1), (2) dan (3)

Wargadinata, Wildana. *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Wawancara

Pandu, Wawancara, 10 September 2022

Tri Wahyuni, Wawancara, 25 Maret 2023

Suryani, Wawancara, 26 Maret 2023

Rusmini, Wawancara, 26 Maret 2023

Sutini, Wawancara, 26 Maret 2023

Cicik, Wawancara, 27 Maret 2023

LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

1. Narasumber : Tri Wahyuni

Jabatan : Pendamping

Waktu : 25 Maret 2023

Lokasi : Rumah Tri Wahyuni

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sejak kapan PKH di Desa Kandang sapi dimulai?	PKH masuk Desa Kandang sapi itu pada tahun 2011
2.	Bagaimana awal mula ibu menjadi pendamping PKH di Desa Kandang sapi?	Awalmulanya itu saya ya ditunjuk oleh pengurus kecamatan yang menangani PKH ini
3.	Bagaimana penerapan PKH di Desa Kandang sapi?	Tahap persiapan, PKH di Kandang sapi baru mulai tahun 2011, dulu itu pendampingnya hanya satu se-Kecamatan, kemudian tahun 2016 baru ditambah 5 orang. Kalau saya itu mulai jadi pendamping PKH tahun 2018. Awal sebelum saya menjadi pendamping itu ada bimbingan teknis, bimbingan pemantapan dan diklat. Bimbingan tersebut tergantung dari Kementerian Sosial, ada yang di Jogja, Solo, dan lainnya, kalau saya dulu di Dayu sana bimbingan dan diklatnya selama dua minggu. Pengumpulan data dan informasi, Data orang yang menerima bantuan itu bukan dari kita, tapi dari pusat atau Dinas Sosial. Saya sebagai pendamping hanya melakukan verifikasi yang sudah ada. Hal ini juga menjadi hambatan bagi saya dan teman-teman pendamping, karena orang-orang ingin menerima bantuan dan mengira bahwa pendamping itu yang menentukan apakah seseorang berhak

	menerima atau tidak. Padahal yang menentukan itu dari pusat, kita hanya melaksanakan tugas. Pelaksanaan program. Pertemuan kelompok, Pertemuan kelompok itu dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Sebagai seorang pendamping, pada saat pertemuan kelompok harus bisa berupaya agar pelaksanaan pertemuan kelompok tersebut dapat berjalan. Jadi saya harus melakukan pendekatan kepada penerima bantuan agar pada saat pertemuan mereka merasa nyaman dan tidak canggung, jadi saat pemberian materi mereka bisa menerima dengan baik. Nah di pertemuan tersebut materi yang diberikan itu ada bermacam-macam, ada materi untuk mengelola keuangan dengan benar, untuk menjadi orang tua yang lebih baik dan mendidik anak dengan benar. Selain memberikan materi, sebagai seorang pendamping harus bisa memotivasi peserta. PDSE, Pemutakhiran data akan dilakukan oleh pendamping PKH apabila terjadi perubahan data mengenai anggota keluarga yang menjadi peserta PKH. Seperti halnya saat ada anak dari peserta PKH yang awalnya sekolah di SDN 1 Kandangsapi kemudian Pindah Ke SDN 2 Kandangsapi. Verifikasi Komitmen, Setiap bulan itu, sebagai pendamping saya memiliki tugas untuk melakukan verifikasi komitmen dengan melakukan pengawasan. Saya harus mengunjungi sekolah, puskesmas, atau posyandu untuk memeriksa sejauh mana mereka aktif dalam melaksanakan kewajiban mereka. Dengan kata lain, kita harus memastikan bahwa mereka melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik dan tidak menyeleweng dari komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Seperti di sekolah bagaimana keadaan anak dari penerima bantuan, apakah aktif di sekolah atau tidak. Kemudian apakah memiliki tanggungan
--	--

		pembayaran atau tidak atau layak nggak sih beragam, sepatu tas dan lainnya. Kalau sampai bermasalahan perlu dipertanyakan, untuk apa uang yang cair tersebut. Jadi disini saya harus menegur KPM yang seperti ini Jangan sampai uang yang cair digunakan untuk keperluan yang diluar batas. Evaluasi, Sekarang kan ya orang-orang itu pada nggak mau ketinggalan jaman yaa, bahkan orang tua sekarang pada nggak mau ketinggalan jaman. Banyak yang meniru gaya hidup yang wahh gitu, nahn dari penerima bantuan juga ada yang menirukan gaya hidup yang seperti itu dengan pakai hp yang android, terus ada yang ngredit motor padahal kemungkinan untuk memikirkan besok makan apa saja mereka masih bingung, tapi kok yaa seperti itu. Terminasi, Graduasi itu adalah proses kelulusan dari program PKH. Saat ini, ada bentuk Graduasi Mandiri yaitu dimana KPM yang merasa sudah mandiri dapat mengajukan keluar dari program tersebut. Namun, KPM yang melakukan ini itu masih sangat sedikit, karena kebanyakan kan ya merasa nyaman dengan bantuan yang diterima setiap tahunnya. Ada juga Graduasi Paksa, yaitu ketika KPM dianggap sudah mampu, namun enggan untuk keluar dari program, maka akan dipaksa untuk keluar. Oleh karena itu, penting dari kita untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada KPM agar mereka bisa memahami bahwa Graduasi Mandiri adalah hal yang baik untuk masa depan mereka. Kalau graduasi paksa itu darimpending bisa langsung memberi pemahaman kepada peserta itu bahwasanya mereka sudah tidak layak menerima bantuan, lalu setelah itu dari pendamping bisa menyetorkan nama peserta yang berhak digraduasi ke atasan sana.
4.	Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan PKH di Desa	Kalua pelaksanaan sama kayak yang tadi mbak, pertemuan kelompok, PDSE, Verifikasi

	kandang sapi?	komitmen.
5.	Bagaimana tingkat kesejahteraan KPM sebelum dan sesudah menjadi anggota PKH?	Kalau dikatakan sekarang sudah sejahtera apa belum itu ya ada sebagian sudah sejahtera ada yang belum. Tapi setelah mendapatkan bantuan ini mereka sangat terbantu, mereka lebih peduli dengan Kesehatan mereka dan pendidikan anaknya.
6.	Biasanya KPM menggunakan uangnya untuk apa?	Kan dalam PKH itu sudah ada ketentuan dalam penggunaan dana bantuan. Jadi mereka harus menggunakan uang tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Misal mereka mendapat bantuan karena mempunyai anak yang sekolah, jadi uangnya harus dipakai untuk keperluan sekolah anaknya. Tapi masih ditemukan beberapa penerima yang tidak menggunakan uang sesuai ketentuan yang ada.
7.	Apakah implementasi PKH sudah sesuai dengan prinsip keadilan?	Di Desa Kandang sapi itu kan masyarakat miskinnya banyak, kalo ndak salah kuranglebih ada 887 keluarga terus yang nerima bantuan itu hanya 332 keluarga, jadi karena banyaknya masyarakat miskin tersebut, masih ada yang belum mendapatkan manfaat dari program tersebut, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan mereka itu ya namanya orang desa kan ya merasa kok itu dapat terus dia tidak dapat padahal sama-sama miskinnya
8.	Apakah implementasi PKH sudah sesuai dengan prinsip tanggung jawab?	kalau saya selama jadi pendamping PKH itu ya insyaallah sudah melakukan kewajiban saya jadi pendamping. Kalau waktunya pertemuan ya saya hadir, waktu pemantauan secara rutin terhadap penerima bantuan juga sudah saya lakukan sesuai dengan arahan
9.	Apakah implementasi PKH sudah sesuai dengan prinsip <i>takaful</i> ?	dengan adanya jaminan sosial dari pemerintah berupa adanya PKH ini saya rasa dari masyarakat desa sini sangat bersyukur, karena mereka sangat merasa terbantu. Sehingga

		mereka bisa mengakses Pendidikan dan Kesehatan dengan mudah
10.	Apa saja faktor pendorong dalam pelaksanaan PKH di desa Kandang sapi?	Salah satu faktor pendukung saat implementasi program PKH yaitu masyarakat yang antusias karena akan mendapatkan bantuan, jadi mereka bersemangat untuk melakukan pertemuan. selain itu dalam penerapan PKH ini koordinasi dari berbagai pihak yang terlibat sudah terjalin dengan baik. Seperti dari bidang pendidikan guru itu berperan untuk meningkatkan kualitas anak dan rutin melakukan absensi anak KPM.
11.	Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH di desa Kandang sapi?	Banyak dari KPM PKH yang memiliki usia yang sudah lanjut dan pendidikan mereka sangat rendah, bahkan ada juga yang tidak bersekolah. Jadi mereka itu sering lupa dengan informasi yang diberikan dan sulit untuk mengingatnya, jadi butuh perwakilan KPM yang bisa menyampaikan informasi dari pendamping agar lebih mudah dipahami oleh mereka. selain itu Terkadang itu Mbak, ada KPM yang tidak pernah hadir dalam kegiatan sosialisasi, sehingga mereka itu tidak mengetahui informasi apa saja yang disampaikan dalam setiap pertemuan. Selain itu, sering terjadi disinformasi, terus jika terjadi kesalahan pada KPM, mereka cenderung menyalahkan pendamping, padahal sebenarnya mereka sendiri yang tidak pernah menghadiri sosialisasi.
12.	Bagaimana dampak positif dari implementasi PKH di Desa Kandang sapi?	Dampak positifnya ya meningkatkan pendidikan dan kesehatan dari KPM.
13.	Bagaimana dampak negatif dari implementasi PKH di Desa Kandang sapi?	Kalau negatifnya mereka terlalu nyaman dengan bantuan ini alias ketergantungan. Terus menimbulkan kecemburuan masyarakat yang tidak dapat bantuan.

TRANSKIP WAWANCARA

2. Narasumber : Suryani

Jabatan : Pendamping

Waktu : 26 Maret 2023

Lokasi : Rumah Suryani

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sejak kapan PKH di Desa Kandang sapi dimulai?	PKH masuk Desa Kandang sapi tahun 2011
2.	Bagaimana awal mula ibu menjadi pendamping PKH di Desa Kandang sapi?	Saya ya ditunjuk oleh pengurus kecamatan yang menangani PKH
3.	Bagaimana penerapan PKH di Desa Kandang sapi?	Tahap persiapan, Saya jadi pendamping PKH itu mulai tahun 2016, dulu sebelum jadi pendamping itu calon-calon pendamping harus mengikuti bimbingan teknis dan lain-lain dari Dinas Sosial terlebih dahulu. Dulu itu saya mengikuti BIMTEK di Solo bareng sama teman-teman perwakilan dari kecamatan Pengumpulan data dan informasi, sebagai pendamping saya tidak bisa menentukan siapa yang berhak mendapat bantuan, tapi pendamping juga berpengaruh dalam proses pemutakhiran data yang nantinya dari pusat bisa menimbang apakah orang ini layak atau tidak menjadi penerima Pelaksanaan program. Pertemuan kelompok, biasanya pertemuan kelompoknya rutin dilakukan setiap sebulan sekali di rumah ketua kelompok. Biasanya pertemuan tersebut selama satu setengah jam sampai dua jam. Disana para penerima bantuan kita motivasi dan kita bekali tentang berbagai hal seperti bagaimana sih menjadi orang tua yang baik, bagaimana mendidik anak, bagaimana cara ibu rumah tangga

	mengelola keuangan keluarga dengan benar dan yang lainnya. Nah kenapa pertemuan kelompok kok rutin dilakukan itu juga agar bisa merubah perilaku maupun pola pikir penerima bantuan. PDSE, Pemutakhiran data pertama adalah tahap lanjutan setelah calon peserta PKH diakui secara resmi sebagai anggota peserta PKH. Tahap ini dilakukan setelah proses validasi, dimana data yang diperlukan akan dilengkapi dan dikumpulkan untuk menjamin kelengkapan data hasil validasi. Nah Pemutaakhiran data ini ada pemutaakhiran rutin yang dilakukan setiap saat sesuai dengan kondisi terkini dari peserta. Dan pemutaakhiran data besar yang dilakukan setiap tahun atau setiap tahun ajaran baru. Verifikasi Komitmen, Setelah bergabung dengan PKH, peserta akan memiliki hak dan kewajiban. Haknya adalah mendapatkan bantuan, sedangkan beberapa kewajibannya yaitu menghadiri FDS, memeriksakan kesehatan ke puskesmas, dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Sebagai pendamping, tugas kita adalah melakukan verifikasi komitmen dengan cara mengunjungi langsung sekolah, puskesmas, atau posyandu di desa setiap bulan. Ini adalah tugas rutin kita sebagai pendamping. Dengan melakukan verifikasi komitmen, kita memastikan bahwa anggota PKH melaksanakan kewajiban mereka dengan baik dan memenuhi syarat untuk mendapatkan hak-hak yang telah diberikan kepada mereka. Evaluasi, kalau saya lihat itu alhamdulillahnya setelah adanya program ini, kepedulian masyarakat akan Pendidikan dari anaknya itu meningkat. Soalnya sebelumnya itu banyak yang langsung memilih bekerja dari pada sekolah, bahkan setelah SD sudah tidak sekolah itu juga hal yang biasa bagi mereka. Terus ya ada yang lulus SMP langsung kerja juga banyak
--	--

		Terminasi, Tahap akhir dari program PKH itu disebut Graduasi, disitu KPM dianggap tidak lagi termasuk dalam keluarga miskin berdasarkan kriteria tertentu, seperti mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, kesehatan, dan pendidikan, serta meningkatkan perekonomian mereka dengan membuka usaha sendiri. Dengan itu, KPM dianggap lulus dari program PKH dan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk terus menerima bantuan PKH. Kalau untuk tahapan graduasi itu biasanya dari pendamping memantau perkembangan ekonomi KPM yang awalnya dibekali pembelajaran saat pertemuan kelompok. Saat pertemuan kelompok kan peserta diajari bagaimana mengelola uang dengan benar, Bagaimana memulai usaha. Nah setelah itu kita memantau para peserta yang sudah mencoba memulai usaha, setelah itu sekiranya usaha mereka berjalan dengan lancar dan sudah mampu mencukupi berbagai kebutuhan sehari-hari atau sudah bisa mandiri maka selanjutnya kami berhak menggraduasi peserta tersebut.
4.	Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan PKH di Desa kandasapi?	Ada pertemuan kelompok, PDSE dan verifikasi komitmen.
5.	Bagaimana tingkat kesejahteraan KPM sebelum dan sesudah menjadi anggota PKH?	Kalau dilihat-lihat belum semua yang bisa dikatakan sejahtera, apalagi dari lansia. Yang mempunyai potensi besar untuk sejahtera itu ya yang masih muda-muda. Meskipun mereka belum bisa dikatakan sejahtera tapi adanya bantuan ini sangat membantu bagi bagi para penerima.
6.	Biasanya KPM menggunakan uangnya untuk apa?	Ya sesuai dengan ketentuan yang ada di PKH itu mbak. Tapi ya masih banyak juga yang melanggar peraturan tersebut.
7.	Apakah implementasi PKH sudah sesuai dengan prinsip keadilan?	Dulu itu ada dari masyarakat yang mengadu kepada saya kok dia itu tidak dapat tetapi tetangganya dapat PKH. Sebenarnya kalau dilihat memang dia itu berhak menerima

		bantuan. Tetapi kan saya juga tidak bisa menjadikan dia sebagai penerima, karena yang mengatur sudah dari atasan sana
8.	Apakah implementasi PKH sudah sesuai dengan prinsip tanggung jawab?	Kalau sudah diberi tanggung jawab itu ya sebisa mungkin tak laksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi semua hak dan kewajiban saya sebagai pendamping itu insyaallah sudah saya jalankan sebaik mungkin. Tapi kalau dari penerima bantuan itu terkadang masih susah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawabnya sebagai penerima. Ada beberapa orang itu yang tidak bisa mempertanggung jawabkan kegunaan uang bantuan dengan semestinya. Yang seharusnya uang itu diwajibkan untuk urusan pendidikan anaknya malah digunakan untuk shopping barang yang tidak perlu
9.	Apakah implementasi PKH sudah sesuai dengan prinsip <i>takaful</i> ?	adanya bantuan PKH dari pemerintah ini menurut saya sangat mendorong terciptanya hubungan yang baik antara masyarakat dengan pemerintah
10.	Apa saja faktor pendorong dalam pelaksanaan PKH di desa Kandang sapi?	orang desa sini kan rata-rata dari kalangan masyarakat dengan ekonomi yang rendah, jadi begitu dengar mereka dapat bantuan mereka sangat antusias, jadi kalau disuruh untuk kumpulan mereka sangat semangat dan Seperti yang disampaikan Mbak Tri tadi bahwa selain pada bidang Pendidikan, dalam bidang kesehatan juga sudah terkoordinasi dengan baik, yaitu adanya pemantauan kondisi Kesehatan Ibu hamil dan balita ketika ada posyandu.
11.	Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH di desa Kandang sapi?	Yang sulit itu lansia mbak, kan usianya yang sudah tua jadi untuk memahami materi itu mereka kesulitan. Selain itu disabilitas juga sulit, karena ya mereka punya keterbatasan. Jadi saya harus ngasih informasi ke keluarga mereka dan Hambatan yang mungkin terjadi adalah ketika ada KPM yang tidak memahami materi yang dijelaskan oleh pendamping, dan justru malah asyik mengobrol dengan KPM lainnya
12.	Bagaimana dampak	Dampak positifnya mereka bisa merubah pola

	positif dari implementasi PKH di Desa Kandang sapi?	piker mereka, seperti menyadari bahwa pendidikan dan Kesehatan itu penting.
13.	Bagaimana dampak negatif dari implementasi PKH di Desa Kandang sapi?	Kalau negatifnya ya sama yang dikatakan mbak Tri, mereka sudah terlalu nyaman dengan bantuan PKH.



TRANSKIP WAWANCARA

3. Narasumber : Rusmini

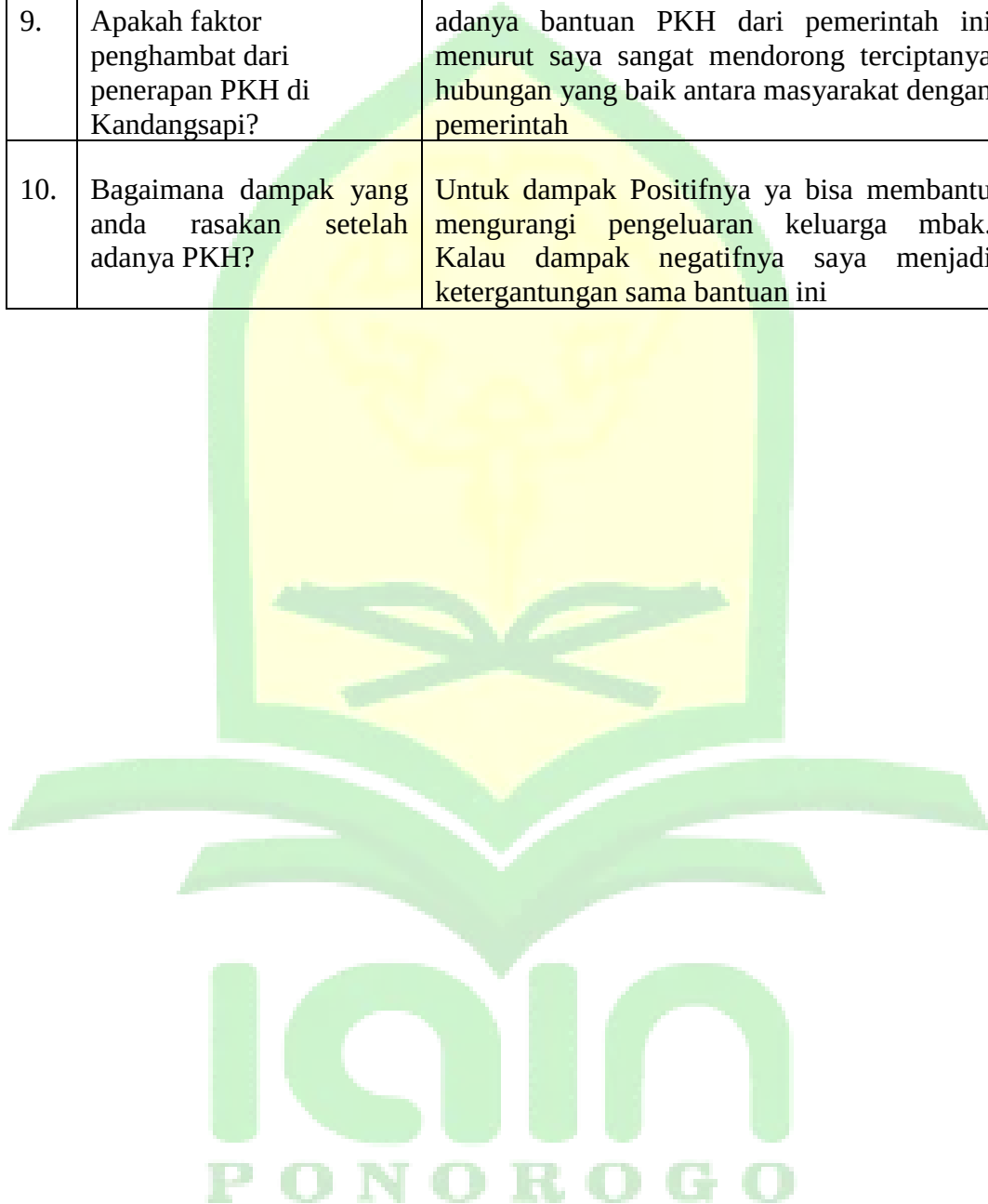
Jabatan : Penerima PKH

Waktu : 25 Maret 2023

Lokasi : Rumah Rusmini

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sejak kapan anda menjadi peserta PKH?	Saya jadi peserta itu sudah dari tahun 2011 mbak
2.	Apa yang anda ketahui tentang PKH?	Kalua setahu saya PKH itu bantuan yang berupa uang tunai.
3.	Apakah anda aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKH?	Insyaallah aktif mbak. Selagi saya bisa mesti tak laksanakan
4.	Uang bantuan jika sudah cair digunakan untuk apa?	Kalua saya tak pake keperluan buat anak sekolah mbak. Karna saya mendapatkan bantuan karena mempunyai tanggungan anak yang masih sekolah itu.
5.	Apakah menurut ibu PKH di Kandang sapi sudah sesuai dengan prinsip keadilan?	Ya kalo aku sendiri senang karena dapet bantuan. Tapi aku yo kasian sama konco-konco seng gak oleh, padahal sama-sama nggak punya mbak. Ya aku mung bisa mendoakan buat konco-konco seng gak dapet bantuan PKH semoga bisa dapet bantuan lain PKH
6.	Apakah menurut ibu PKH di Kandang sapi sudah sesuai dengan prinsip tanggungjawab?	Kalau dari saya sendiri sudah mbak. Saya berusaha bertanggung jawab atas kegunaan dana yang diberikan. Tapi saya tau ada penerima itu memakai uang untuk nyicil motor ada yang buat beli HP.
7.	Apakah menurut ibu PKH di Kandang sapi sudah sesuai dengan prinsip jaminan social (<i>takaful</i>)?	Sudah mbak, karna program in ikan ya dari pemerintah jadi pemerintah sudah berusaha membuat kami yang miskin ini untuk lebih sejahtera.

8.	Apakah faktor pendukung dari penerapan PKH di Kandang sapi?	Kalau dari saya pas waktu awal tau saya dapat bantuan ya saya senang mbak, terus pas disuruh pertemuan awal itu saya antusias ya soalnya seneng gitu.
9.	Apakah faktor penghambat dari penerapan PKH di Kandang sapi?	adanya bantuan PKH dari pemerintah ini menurut saya sangat mendorong terciptanya hubungan yang baik antara masyarakat dengan pemerintah
10.	Bagaimana dampak yang anda rasakan setelah adanya PKH?	Untuk dampak Positifnya ya bisa membantu mengurangi pengeluaran keluarga mbak. Kalau dampak negatifnya saya menjadi ketergantungan sama bantuan ini



TRANSKIP WAWANCARA

4. Narasumber : Sutini

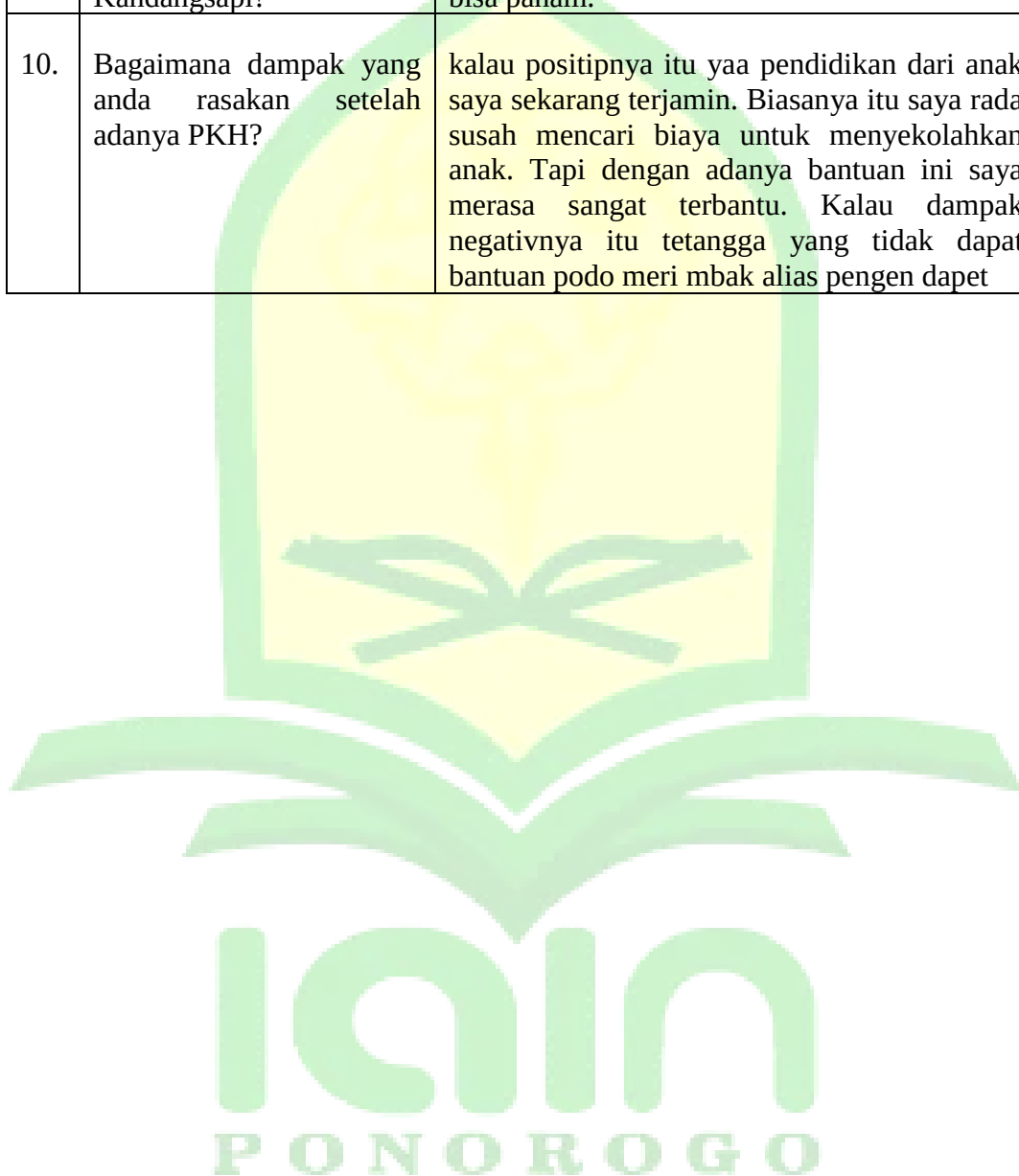
Jabatan : Penerima PKH

Waktu : 26 Maret 2023

Lokasi : Rumah Sutini

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sejak kapan anda menjadi peserta PKH?	Mulai tahun 2015 mbak
2.	Apa yang anda ketahui tentang PKH?	Yang tak ngertini itu PKH i bantuan dari pemerintah untuk orang yang miskin.
3.	Apakah anda aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKH?	Kalau seperti arisan PKH itu saya kalo gak ada acara saya mesti datang, kalau yang lain kayanya saya ya sudah tak jalankan semua mbak
4.	Uang bantuan jika sudah cair digunakan untuk apa?	Tak gunakan buat beli susu ibu hamil terus priksa kandungan gitu mbak.
5.	Apakah menurut ibu PKH di Kandang sapi sudah sesuai dengan prinsip keadilan?	Kalau ada yang meri soal e tidak dapat bantuan itu ya berarti nggak adil kan mbak. Jane yo kasian tapi saya nggak bisa apa-apa
6.	Apakah menurut ibu PKH di Kandang sapi sudah sesuai dengan prinsip tanggungjawab?	Kalua saya pas dapat bantuan ya sebisa mungkin uangnya tak gunakan untuk kebutuhan buat ibu hamil dan sekolah anak, kan karna saya ya hamil terus punya anak yang masih sekolah. Tapi denger-denger teman-teman ada yang malah beli HP gitu.
7.	Apakah menurut ibu PKH di Kandang sapi sudah sesuai dengan prinsip jaminan social (<i>takaful</i>)?	Disini kan saya diberikan jaminan sosial dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil. Jadi bisa dikatakan sesuai kan mbak.
8.	Apakah faktor pendukung	Wahh pas saya dengar saya dapat bantuan

	dari penerapan PKH di Kandang sapi?	saya sueneng mbak. Soalnya ya saya nggak pernah dapat bantuan gek sekarang dapat jadi pengeluaran bisa berkurang mbak.
9.	Apakah faktor penghambat dari penerapan PKH di Kandang sapi?	Aku ki wong bodo mbak, sekolah SD aja tidak lulus. Jadi kalau ada materi-materi saya itu susah nangkepnya, jadi kudu pelan-pelan baru bisa paham.
10.	Bagaimana dampak yang anda rasakan setelah adanya PKH?	kalau positifnya itu yaa pendidikan dari anak saya sekarang terjamin. Biasanya itu saya rada susah mencari biaya untuk menyekolahkan anak. Tapi dengan adanya bantuan ini saya merasa sangat terbantu. Kalau dampak negatifnya itu tetangga yang tidak dapat bantuan podo meri mbak alias pengen dapet



TRANSKIP WAWANCARA

5. Narasumber : Cicik

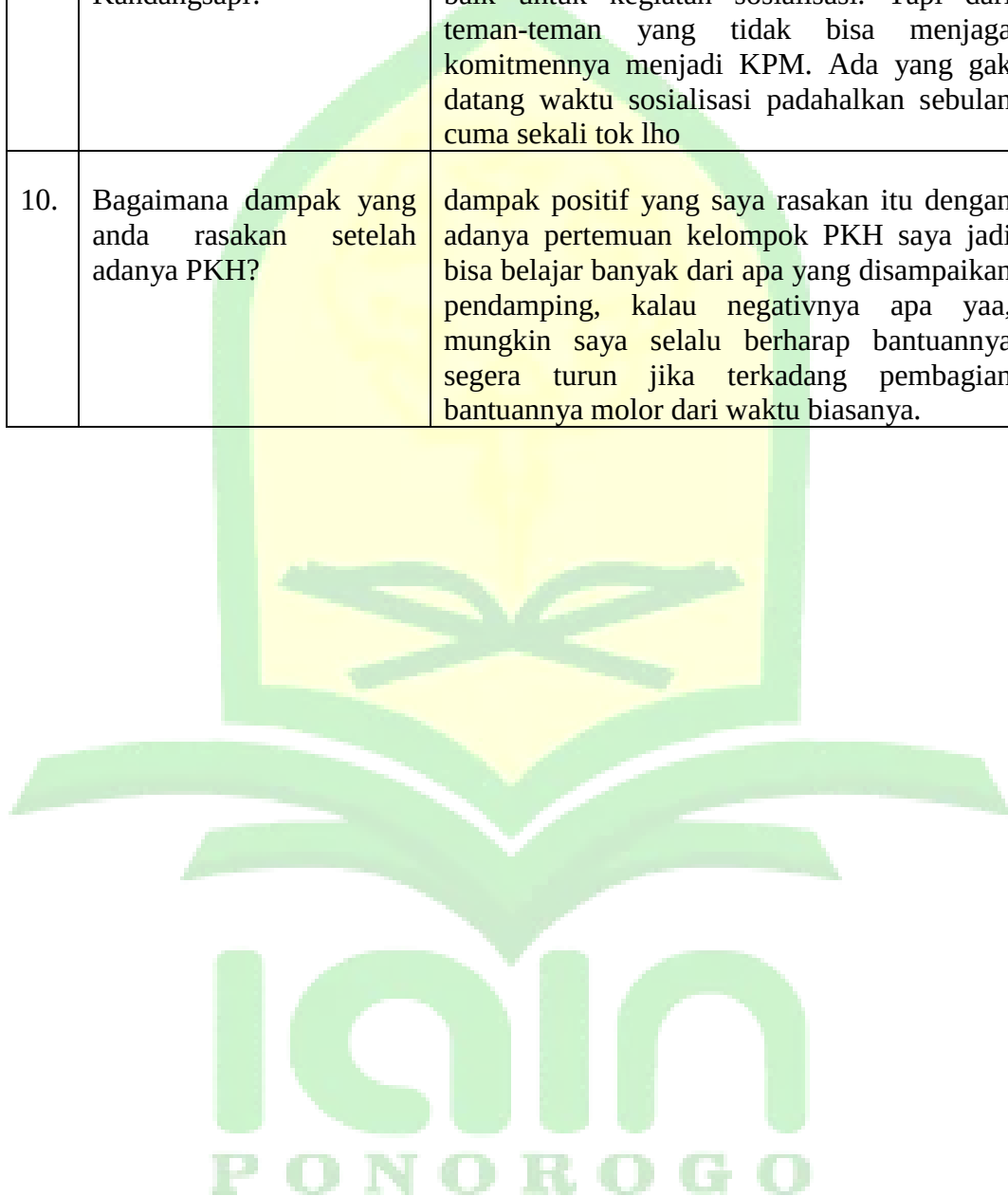
Jabatan : Penerima PKH

Waktu : 27 Maret 2023

Lokasi : Rumah Cicik

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sejak kapan anda menjadi peserta PKH?	Dari awal PKH saya udah dapat
2.	Apa yang anda ketahui tentang PKH?	Bantuan berupa uang untuk orang miskin, untuk lansia, yang punya anak balita dan yang masih sekolah.
3.	Apakah anda aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKH?	Tapi terkadang saya tidak ikut pertemuan kelompok mbak. Anak ada yang masih kecil.
4.	Uang bantuan jika sudah cair digunakan untuk apa?	Tak gunakan buat beli kebutuhan anak balita mbak sama kebutuhan anakku sekolah.
5.	Apakah menurut ibu PKH di Kandang sapi sudah sesuai dengan prinsip keadilan?	Ya gitu mbak kasian sama yang gak dapat bantuan padahal sama-sama miskin. Jadi belum adil.
6.	Apakah menurut ibu PKH di Kandang sapi sudah sesuai dengan prinsip tanggungjawab?	Kalau saya sendiri sudah bertanggung jawab terhadap uang yang diberikan. Tapi kalau yang lain nggak tau ya mbak. Tapi dengar-dengar ada yang menyalahgunakan.
7.	Apakah menurut ibu PKH di Kandang sapi sudah sesuai dengan prinsip jaminan sosial (<i>takaful</i>)?	saya senang mbak dapet bantuan ini, saya merasa terbantu, karena yaa anak saya itu banyak dan belum ada yang kerja, masih sekolah dan balita. Pokoknya saya sangat berterima kasih kepada pemerintah karena sudah diberikan bantuan ini.
8.	Apakah faktor pendukung dari penerapan PKH di Kandang sapi?	Seneng banget mbak pas awal saya dapat. Kan tanggungan saya kan ya banyak mbak jadi seneng ada yang membantu mengurangi

		beban, terus pas di suruh pertemuan awal saya semangat.
9.	Apakah faktor penghambat dari penerapan PKH di Kandang sapi?	Tidak ada hambatan mbak kalau dari pendamping sejauh saya menjadi penerima PKH, pendamping juga menjelaskan dengan baik untuk kegiatan sosialisasi. Tapi dari teman-teman yang tidak bisa menjaga komitmennya menjadi KPM. Ada yang gak datang waktu sosialisasi padahalkan sebulan cuma sekali tok lho
10.	Bagaimana dampak yang anda rasakan setelah adanya PKH?	dampak positif yang saya rasakan itu dengan adanya pertemuan kelompok PKH saya jadi bisa belajar banyak dari apa yang disampaikan pendamping, kalau negatinya apa yaa, mungkin saya selalu berharap bantuannya segera turun jika terkadang pembagian bantuannya molor dari waktu biasanya.



Lampiran 2. Dokumentasi

Nomor : 1

Hari/tanggal : 25 Maret 2023

Lokasi : Rumah Pendamping

Kegiatan Dokumentasi	
Wawancara dengan Ibu Tri Wahyuni (Pendamping PKH Desa Kandang sapi)	

Nomor : 2

Hari/Tanggal : 26 Maret 2023

Lokasi : Rumah Pendamping

Kegiatan Dokumentasi	
Wawancara dengan Ibu Suryani (Pendamping PKH Desa Kandang sapi)	

PONOROGO

Nomor : 3

Hari/Tanggal : 25 Maret 2023

Lokasi : Rumah Penerima PKH



Nomor : 4

Hari/Tanggal : 26 Maret 2023

Lokasi : Rumah Penerima PKH



Nomor : 5

Hari/Tanggal : 27 Maret 2023

Lokasi : Agen 46 Desa Kandang sapi

Kegiatan Dokumentasi

Wawancara dengan Ibu Cicik
(Penerima PKH Desa Kandang sapi)



RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama : Ainia Nuril Qomariyah
2. Tempat, tanggal lahir : Sragen, 28 November 2000
3. Alamat Rumah : Kandang sapi, Jenar, Sragen, Jawa Tengah
4. No. HP : 087702952054
5. E-Mail : nurilainia@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Kandang sapi (Tahun 2007-2013)
2. MTS Darul Huda Mayak (Tahun 2013-2016)
3. MA Darul Huda Mayak (Tahun 2016-2019)

Ponorogo, 25 April 2023

Ainia Nuril Qomariyah

401190217

IAIN
PONOROGO